PERANAN KEPEMIMPINAN KETUA NU DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*

(studi kasus di desa Sumorame kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K U 2012 015 PI
No. REG : U2012/PI/015
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :
ACHMAD KHOLIL
NIM E0 42 06 015

PRODI FILASAFAT POLITIK ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2O12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERANAN KEPEMIMPINAN KETUA NU DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE*

(studi kasus di desa Sumorame kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

ACHMAD KHOLIL

NIM E0 42 06 015

PRODI FILASAFAT POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2O12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh **Achmad Kholil** ini telah
diperiksa dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, 10 Februari 2012

Pembimbing

Dr. Slamet Muliono Redjosari, M.Si

NIP. 196811291996031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh **Achmad Kholil** *ini telah dipertahankan*
di depan tim penguji skripsi
Surabaya, 8 Maret 2012
Mengesahkan
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Ma'shum, M.Ag.
Nip. 196009141989031001

Ketua,

Dr. Slamet Muliono Redjosari, M.Si
NIP. 196811291996031003

Sekretaris,

M. Anas Fakhruddin, S.Th.i, M.Si
Nip. 198202102009011007

Penguji I,

Andi Suwarko, M. Si
Nip. 197411102003121004

Penguji II,

Holilah, S. Ag, M. Si
Nip. 197610182008012008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Achmad Kholil: *Peranan kepemimpinan ketua NU dalam mewujudkan good governance (studi kasus di desa Sumorame kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo).*

Kegiatan manusia secara bersama-sama, selalu membutuhkan kepemimpinan, jadi harus ada pemimpin demi sukses dan efisiensi kerja. Keharusan membentuk pemimpin dimulai dari kesadaran manusia bahwa dalam sebuah komunitas pasti membutuhkan seorang panutan, teladan, pengarah, dan pengayom, demi menjaga tatanan sosial kebangsaan. Dengan demikian pemimpin diharapkan bisa menuntun atau membimbing kinerja bawahan atau pengikutnya kepada pemerintahan yang lebih baik atau dalam istilah populernya disebut *good governance* sehingga bisa tercipta hubungan sinergis antara pemerintah dengan warga yang berujung kepada partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.

NU (*Nahdlatul Ulama*) adalah sebuah organisasi masyarakat islam dengan jumlah massa terbesar di Indonesia, yang mempunyai struktur mulai dari pimpinan pusat hingga pimpinan rating di pedesaan juga tidak terlepas dengan kebutuhan formasi struktural untuk menjalankan perannya dengan optimal. Dan lazimnya sebuah organisasi maka peran seorang pemimpin menjadi sangat sentral karena merupakan ruh pergerakan dari sebuah organisasi itu sendiri. Sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin harus sangat hati-hati dan bijaksana sehingga tercipta sebuah suasana yang kondusif yang semua itu dapat tercapai jika prinsip-prinsip *good government* yang mempunyai ciri ; adanya patisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi terhadap konsensus, keadilan, efektifitas dan efesiensi, visi strategis, serta akuntabilitas yang diimplementasikan dengan baik.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empirik yang menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif. Adapun sumber primer dari penelitian ini adalah sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan sumber sekunder diperoleh dari hal–hal yang berkaitan dengan penelitian, antara lain buku, jurnal, artikel, koran, browsing data internet, dan berbagai dokumentasi pribadi maupun resmi. Dan analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis data.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam kepengurusan organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Ranting Sumorame diketahui bahwa implementasi dari prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, reponsif dan partisipasi yang merupakan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good clean governance*) yang bebas dari KKN bisa dijalankan dengan baik, terlihat dari berjalannya Proses *checks and balances* dan kontrol masyarakat terhadap kepengurusan berjalan dengan baik, sehingga ketua cenderung mempersempit gerak untuk melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Nahdlatul Ulama, *Good Governance.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K U 2012 015
No. REG : U 2012/PI/015
ASAL BUKU :
TANGGAL :

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

ABSTRAK iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Kegunaan Penelitian 8

E. Definisi Operasional 9

F. Telaah Pustaka 9

G. Metodologi Penelitian 12

1. Pendekatan dan jenis Penelitian 13
2. Lokasi Penelitian 16
3. jenis dan Sumber Data 17
4. Instrument Penelitian 18
5. Tahap – tahap Penelitian 18
6. Tahap Pengumpulan Data 22
7. Tehnik Keabsahan Data 24

H. Sistematika Pembahasan 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KERANGKA TEORITIK 29

A. Kepemimpinan 29

1. Definisi kepemimpinan 29
2. Teori – teori Kepemimpinan 30
3. Gaya Kepemimpinan 31

B. *Good Governance* 23

1. Pengertian *Good Governance* 32
2. Prinsip – prinsip *Good Governance* 34
3. Upaya Mewujudkan *Good Governance* 39

BAB III SETTING PENELITIAN 45

A. Gambaran Umum Desa Sumorame 45

1. Keadaan Geografis 45
2. Keadaan Demografis 46

B. Kondisi Obyektif Desa Sumorame 47

1. Kondisi Sosial Budaya 47
2. Kondisi Pendidikan 48
3. Kondisi Ekonomi 50
4. Kondisi Keagamaan 51

C. Sekilas Mengenai NU 53

1. Sejarah Berdirinya NU 53
2. Struktur Kepengurusan di Ranting Sumorame 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 62

A. *Hasil Penelitian* 62

1. Langkah – langkah Ketua NU Dalam Menjalankan Fungsinya 62

2. Implementasi Prinsip – prinsip Good Governance 66

B. Analisis Hasil Penelitian 71

1. Langkah – langkah Ketua NU Dalam Menjalankan Fungsinya 71

2. Implementasi Prinsip – prinsip *Good Governance* 73

3. Dampak Dari Implementasi Prinsip – prinsip *Good Governance* 79

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 83

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kajian dalam penelitian ini meneliti tentang peranan kepemimpinan ketua NU dalam mewujudkan *good governance* (pemerintahan yang baik), hal ini didasarkan oleh sebuah asumsi bahwa kegiatan manusia secara bersama-sama, selalu membutuhkan kepemimpinan, jadi harus ada pemimpin demi sukses dan efisiensi kerja. Keharusan membentuk pemimpin dimulai dari kesadaran manusia bahwa dalam sebuah komunitas pasti membutuhkan seorang panutan, teladan, pengarah, dan pengayom, demi menjaga tatanan sosial kebangsaan.

Kartini Kartono mengemukakan bahwa fungsi kepemimpinan adalah: Memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangun motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, memberikan supervisi/pengawasan yang efisien, dan membawa pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan.[1]

Dengan demikian pemimpin diharapkan bisa menuntun atau membimbing kinerja bawahan atau pengikutnya kepada pemerintahan yang lebih baik atau dalam istilah populernya disebut *good governance* sehingga bisa tercipta hubungan sinergis antara pemerintah dengan warga yang berujung kepada partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.

---

[1] Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1998), 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Good governance mengandung arti hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara Negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*).[2] Dalam hal ini adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektifitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Dalam menuju *good governance*, etika politik dan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efesien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap pada aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, prinsip-prinsip atau pun karakteristik kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah adanya patisipasi masyarakat (*participation*), tegaknya supremasi hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), daya tanggap (*responsif*), orientasi terhadap konsensus (*consensus orientation*), keadilan (*equity*), efektifitas dan efesiensi (*effectiveness and effesiency*), visi strategis (*strategic vision*) serta akuntabilitas (*accountability*).[3] Jika prinsip-prinsip tersebut telah terlaksana secara sempurna atau maksimal, akan dicapai kualitas pelayanan yang baik dan kesejahteraan masyarakat.

---

[2] Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewargaan ;Civic Education* (Jakarta: Prenada Media, 2000), 181.

[3] *Ibid.*, 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik masyarakat juga berperan aktif untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Peran serta masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk: [4]

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan.
2. Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
3. Hak untuk menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan.
4. Hak memperoleh perlindungan hukum.

Hak masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

Berawal dari hal di atas penulis mencoba mencari relevansi *good governance* dalam pemerintahan salah satu Organisasi keagamaan di level desa. Pada mulanya memang tidak bisa dihindari, bahwa perkembangan masyarakat desa dalam kerangka "modernisasi", berasal dari atas, walaupun ini tidak berarti bahwa semua perkembangan yang telah terjadi di mulai dari atas.

Nahdlatul Ulama (*Kebangkitan Ulama* atau *Kebangkitan Cendekiawan Islam*), disingkat NU, Organisasi ini berdiri pada 31 Januari

---

[4] Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), 309-310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1926 dan bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan basis massa terbesar di wilayah perdesaan. Fakta sosiologis dan demografik yang memperkuat realitas tersebut adalah banyaknya jumlah pesantren, lembaga pendidikan, dan masjid-masjid yang dimiliki NU banyak tersebar di perdesaan.

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai sebuah organisasi jam'iyyah (organisasi massa) lahir dari wawasan keagamaan yang bertujuan memajukan paham Islam *ahlussunnah wal jama'ah.*[5] Dilihat dari tujuannya tersebut maka tidak heran jika kepemimpinan dalam organisasi ini selalu identik dengan ulama'.

Hal ini bisa dilihat dari nama NU (Nahdlatul Ulama') sendiri yang memiliki arti kebangkitan Ulama'.[6] Menurut Kiai Achmad Siddiq pemilihan nama ini, bukan nahdlatul muslimin atau nahdlatul ummah umpanya, membuktikan betapa penting dan khasnya kedudukan ulama' dalam jam'iyah Nahdlatul ulama'.[7]

Adapun kriteria ulama yang diberikan NU kepada seseorang, yakni :[8]

1. Norma pokok yang harus dimiliki oleh seorang ulama adalah ketaqwaan kepada Alloh.

---

[5] Muhammad Shodiq, *Dinamika Kepemimpinan NU* (Surabaya: Lajnah Ta'lif Nasyr (LTN) NU, 2004), 42.

[6] Kacung Marijan, *Quo Vadis NU: Setelah Kembali ke Khittah 1926* (Jakarta: Erlangga, 1992), 1.

[7] Achmad Siddiq, *Pedoman Berpikir Nahdlatul Ulama'*, (Jember: PMII Cabang Jember, 1969) 13; lihat juga ; Marijan, *Quo Vadis UN...* 30.

[8] Marijan, *Quo Vadis NU...*, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Seorang ulama mempunyai tugas utama mewarisi misi (risalah) Rosululloh meliputi : ucapan, ilmu, ajaran, perbuatan, tingkah laku, mental dan moralnya.
3. Seseorang bisa disebut ulama apabila memiliki ciri utama dalam kehidupan sehari-hari, seperti tekun beribadah, zuhud (melepaskan diri dari kepentingan duniawi), mempunyai ilmu akhirat, mengerti kemaslahatan umat (peka terhadap kepentingan umum).

Penghormatan NU terhadap ulama' diwujudkan dengan didudukkannya di dalam struktur tertinggi organisasi yang dinamakan lembaga *Syuriyah* (semacam legislatif yang mengurusi soal keagamaan) sedangkan tenaga terampil yang tidak intens dalam wawasan agama ditempatkan pada lembaga *Tanfidziyah* (semacam eksekutif) atau yang melaksanakan program kerja.[9]

Adapun Struktur organisasi NU sebagai berikut:

1. Pengurus Besar (tingkat Pusat)
2. Pengurus Wilayah (tingkat Propinsi)
3. Pengurus Cabang (tingkat Kabupaten/Kota)
4. Majelis Wakil Cabang (tingkat Kecamatan)
5. Pengurus Ranting (tingkat Desa/Kelurahan)

Untuk tingkat Pusat, Wilayah, Cabang, dan Majelis Wakil Cabang, setiap kepengurusan terdiri dari:

1. Mustasyar (Penasehat)

---

[9] Thoyfoer, *Politik Kebangsaan NU: Tafsir Khittah NU 1926* (Yogyakarta: Penerbit Mutiara, 2010), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syuriah (Pimpinan Tertinggi)

3. Tanfidziyah (Pelaksana Harian)

Untuk tingkat Ranting, setiap kepengurusan terdiri dari:

1. Syuriyah (Pimpinan tertinggi)

2. Tanfidziyah (Pelaksana harian)

Namun sebutan ulama bagi kalangan Nahdliyin di pedesaan masih kurang terkenal karena mereka lebih mengenal ulama dengan sebutan Kiai. Gelar Kiai ini sendiri tidak mudah untuk mendapatkannya, karena bukan hanya sekedar mendapat dari jenjang-jenjang pendidikan seperti halnya gelar sarjana. Hal ini disebabkan gelar Kiai ini sendiri merupakan pengakuan dari masyarakat atas kepribadiannya secara utuh.

Ada tiga sumber otoritas yang dimiliki oleh para Kiai di pedesaan, pertama, ia merupakan keturunan dari Kiai sebelumnya. Atau setidak-tidaknya, merupakan keluarga dekat dengan Kiai sebelum itu, atau pula murid kesayangan atau menantunya. Kedua, karena kedalaman ilmu keagamaan serta perilakunya yang mencerminkan kedalaman ilmu keagamaannya. Ketiga, ia merupakan "tuan tanah".[10] Dari tiga otoritas inilah yang menempatkan Kiai dalam posisi elite.

Ketiga otoritas tersebut memang bisa berdiri sendiri-sendiri tanpa adanya keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Tetapi, di antara ketiganya berkait satu sama lain. Artinya calon akan memiliki peluang besar terpilih manakala memiliki akuntabilitas lebih dari satu. Semakin besar calon

[10] Marijan, *Quo Vadis UN*... 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mampu mengakumulasi tiga otoritas tersebut, maka semakin berpeluang terpilih sebagai ketua NU. Di samping itu, dasar yang digunakan oleh masyarakat desa Sumorame dalam pemilihan ketua NU secara langsung.

Semenjak terpilihya ketua NU yang baru periode 2011 – 2016 wacana politik yang berkembang di Desa Sumorame adalah masalah tata kelola kepemerintahan, karena masyarakat desa Sumorame merasa bahwa tata kelola pemerintahan yang berjalan pada era sebelumnya kurang bisa mensejahterakan anggota. Seperti, kurangnya pemberdayaan terhadap pengurus maupun anggota, ketidakjelasan sisa dana setelah pengadaan acara (ziarah wali), vakumnya kegiatan keorganisasian, kecuali acara *yasinan* dan *tahlil* yang diadakan setiap malam jum'at serta *lailatul ijtima'* setiap satu bulan sekali.

Kondisi inilah yang selalu membuat keluh-kesah masyarakat terhadap kondisi organisasi terus menggema dan wacana akan adanya perubahan terus bergulir. Dengan demikian, itu sudah mengindikasikan adanya ketidak cocokan masyarakat terhadap kepemimpinan ketua NU. Dari segi tata kelola pemerintahan, di ranting Sumorame tidak tertata dengan baik dan jauh dari *good governance*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka peneliti menarik beberapa rumusan masalah, yakni :

1. Bagaimana pola kepemimpinan ketua NU di Ranting Sumorame?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana peranan kepemimpinan ketua NU itu dalam mewujudkan *Good governance*?

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pola kepemimpinan ketua NU di Ranting Sumorame.
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan kepemimpinan ketua NU dalam mewujudkan *good governance*.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemahaman terhadap pendidikan politik serta realitas sosial yang terjadi, diantaranya adalah :

1. Secara Teoritik :

Secara Teoritik kegunaan penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan pengetahuan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu politik yakni mengetahui tentang peranan kepemimpinan ketua NU dalam mewujudkan *good governance*

Sebagai sumbangan kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, khususnya kepada perpustakaan sebagai bahan bacaan yang bersifat ilmiah dan sebagai kontribusi khazanah intelektual pendidikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis :

Secara praktis, diharapkan hasil skripsi ini sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada para calon pemimpin, untuk dijadikan salah satu bahan masukan bagaimana seseorang saat jadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat menyikapi dan bertindak terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul dalam suatu kegiatan keorganisasian masyarakat.

E. Definisi Operasional

Kepemimpinan : Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi aktifitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan.[11]

Ketua NU : Seseorang yang dipilih untuk menjadi pemimpin dalam menentukan arah dan tujuan Nahdlatul Ulama melalui proses pemilihan secara langsung setiap 5 tahun sekali

Good governance : Suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani (*civil society*), dan sektor swasta.[12]

F. Telaah Pustaka

Hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan penulis terdahulu digunakan sebagai bahan kajian dan masukan bagi penulis, sehingga

---

[11] K. Permadi, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Manajemen* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1996), 10

[12] Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: tim ICCE UIN, 2000), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan dengan hasil-hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis akan lebih berbobot, karena adanya hasil penulisan terdahulu tersebut sebagai tolok ukur atas hasil berkelanjuatan yang telah dicapai. Hasil penulisan terdahulu tersebut antara lain:

1. *Strategi Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) Dalam Mewujudkan Good governance,* sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ni'matul Azzizah Sam Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2006, penelitian ini membahas tentang strategi P3M dalam mewujudkan *good governance* serta hambatan-hambatan yang terjadi pada P3M dalam mewujudkan *good governance*.
2. *Persepsi Masyarakat Tentang Citra Pemerintahan Desa,* sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lilik Marfuatin Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2006, penelitian ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap citra Pemerintahan Desa.
3. Hasil *penelitian* Samad, (Jurusan Administrsi Negara, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2005). Dengan mengambil judul "*Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik* (Studi Kasus Pada Kantor Kelurahan Sidoarjo Kec. Sidoarjo). Rumusan masalah pada penelitian Samat tersebut adalah "Bagaimana Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan Kelurahan Sidoarjo".

   Hasil penelitian yang dilakukan oleh Samad adalah bahwa kurangnya disiplin pegawai yang langsung menanganinya, sehingga dalam pelayanan tertunda, birokrasi yang terlalu berbelit-belit,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persyaratan yang terlalu rumit, prosedur dan motode kerja kurang mendukung, maka mekanisme kerja tidak maksimal, sebagaimana yang diharapkan.

4. Pendidikan Kewargaan (*Civic Education*), karya Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, Prenada Media, Jakarta: 2008, buku ini membahas urgensi dan arti penting *good governance,* prinsip-prinsip *good governance,* serta aspek prioritas pendukung dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good governance,* karya Pandji Santosa, Refirika Aditama, Bandung: 2008, buku ini membahas birokrasi dan memberikan gambaran perjalanan sejarah birokrasi di Indonesia yang memiliki *raport* buruk, khususnya semasa Orde Baru, yang menjadikan birokrasi sebagai mesin politik.
6. *Birokrasi dan Politik di Indonesia,* karya Miftah Thoha, Raja Grafindo, Jakarta: 2003, buku ini membahas tata keperintahan yang baik (*good governance*), menekankan pada peranan manager publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan otonomi manajerial terutama mengurangi campur tangan atau kontrol pemerintah pusat.
7. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa* Depan (*Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik*), karya Sedarmayanti, PT Refika Aditama, Bandung: 2009, pada halaman 271, buku ini menjelaskan tentang kegagalan pemerintahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipicu oleh penyalahgunaan wewenang aparatur pemerintah, sentralistik, *top-down*, *self-oriented*, monopolistik, tidak efektif dan efesien, represif dan kurang peka terhadap aspirasi masyarakat yang mendorong suburnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sehingga terbentuk pola kepemerintahan yang buruk (*bad governance*).

8. *Dinamika kepemimpinan NU,* karya Muhammad Shoddiq, LTN NU Jawa Timur, Surabaya: 2004

Dari hasil penelusuran yang ditemukan oleh penulis di atas, belum ada penelitian maupun karya tulis yang menguraikan tentang peranan kepemimpinan ketua NU dalam mewujudkan *good governance*. Sehingga penelitian ini layak dilanjutkan.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian atau metodologi adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan yang dihadapi. Seperti yang diungkapkan oleh Sumadi dalam buku metodologi penelitian yaitu penelitian dilakukan karena adanya hasrat manusia untuk mengetahui, yang berawal dari kekaguman manusia akan alam yang dihadapi, baik alam semesta ataupun sekitar[13].

Dalam menjabarkan kajian ini, agar lebih tajam dan terarah menggunakan metodologi sebagai alat untuk memahami dan menganalisa antara variabel satu dengan variabel lainya, maka peneliti menggunakan :

---

[13] Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empirik[14] yang menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan). Tujuan penelitian ini adalah mempelajari secara mendalam dan menyeluruh mengenai suatu fenomena kepemimpinan ketua NU ranting Sumorame dalam menjalankan sebuah organisasi keagamaan masyarakat yang terstuktur yang mempunyai pengurus dan anggota. Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan atas hasil pengamatan, wawancara yang diberikan kepada para informan.[15]

Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian yang berjudul peranan kepemimpinan ketua NU dalam mewujudkan *good governance* (studi kasus di desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo), maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Menurut Lexy J. Moeleong yang mengutip Bogdan dan Taylor, bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, penelitian ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).[16]

---

[14] Penelitian empirik yakni penelitian terhadap faksa sosial masyarakat dan fakta sejarah atau terkadang disebut bukti sejarah. Jenis ini lazim disebut penelitian lapangan. Lihat Tim Penyusun Panduan Skripsi, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin* (Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel, 2002), 8.

[15] Yulius Slamet, *Metode Penelitian Sosial* (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2008), 9.

[16] Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam buku metode penelitian tulisan Saifuddin Azwar, penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan kualitatif sama sekali tidak menggunakan dukungan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir normal dan argumentatif. Banyak penelitian kualitatif yang merupakan penelitian sampel kecil.[17]

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa penelitian jenis kualitatif ini mendiskripsikan data-data objektif diperoleh pada site penelitian secara menyuluruh dan proposional sehingga diperoleh hasil yang betul-betul obyektif dan apa adanya.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini menekankankan pada cara berpikir lebih mendalam yang bertitik tolak pada fenomena sosial atau paradigma fakta sosial. Jenis penelitian ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.[18]

---

[17] Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 5-6.
[18] Neong Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Reka Sarasin, 1996), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dilihat dari analisisnya, dalam buku yang sama sebagaimana diatas jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian dekriptif. Penelitian deskriptif adalah melakukan analisisnya hanya sampai pada tiap deskripsi, menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diolah tidak secara terlalu dalam. Kebanyakan pengolahan data di dasarkan pada analisis presentasi dan analisis pada kecenderungan (*trend*).

Menurut Mardalis, penelitian kualitatif deskristif adalah "bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku.

Di dalamnya terdapat upaya mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitannya antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti".[19]

Sebagaimana pemaparan diatas, maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian yang tidak tertulis hanya pada pemaparan data-data temuan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, maka analisa dan interpretasi di tujukan untuk

---

[19] Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendiskripsikan tentang peranan kepemimpinan ketua NU dalam mewujudkan *good governance*. Hal tersebut kemudian peneliti menganalisa dengan menggunakan konsep-konsep teori yang telah dikembangkan oleh ilmuan sosial.

Alasan peneliti memilih jenis penelitian ini karena penelitian kualitatif merupakan suatu cara penelitian yang bersifat fleksibel, dapat menjelaskan sekaligus menganalisa obyek tertentu yang hendak diteliti. Dengan sifat penelitian bertujuan menjabarkan secara analitik suatu obyek penelitian secara menyeluruh maka penelitian yang memuaskan. Kejelasan hasil analisa yang didapatkan dengan menggunakan jenis penelitian ini digambarkan dari pengertian Masri Singharimbung dalam mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu bentuk penelitian yang pada dasarnya berusaha menjabarkan suatu fenomena sosial secara terperinci.

Dengan mendeskripsikan data secara rinci dala suatu fenomena sosial tertentu nantinya diharapkan dapat menjelaskan, menerangkan dan menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian. Disamping itu, hasil penelitian nantinya diharapkan dapat membentuk teori baru atau memperkuat teori-teori yang sudah ada.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian ini dilakukan di desa Sumorame kecamatan Candi-kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Untuk memudahkan penggolongan sumber data berdasar kebutuhan, maka akan dibagi sebagai berikut :

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber data utama dan kebutuhan mendasar dari penelitian ini. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan informan saat terjun langsung ke lapangan tempat penelitian.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.[20] Beberapa informan akan dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian, serta berkaitan dengan tema penelitian. Misalnya beberapa warga, pengurus NU serta ketua NU . Informan ini akan dipilih mewakili beberapa kalangan dilihat dari pekerjaan, pendidikan, pengalaman organisasi, jabatan yang pernah dipegang.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data penunjang sumber utama untuk melengkapi sumber data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari hal–hal yang berkaitan dengan penelitian, antara lain buku, jurnal, artikel, koran, *browsing* data internet, dan berbagai dokumentasi pribadi maupun resmi.

---

[20] Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Instrumen Penelitian

Perlu diketahui bahwa penelitian kualitatif, instrumen penelitian yang dipergunakan bukanlah alat ukur yang disusun atas dasar penegasan judul dari variabel-varibel penelitian sebagaimana yang lebih pada penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif atau konven.[21]

Oleh karena itu, kedekatan penelitian dalam penelitian kualitatitf adalah sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, memiliki kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.[22]

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini dengan cara:

a. Observasi

Observasi (Pengamatan) adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. [23]

Dalam teknik observasi ini peneliti mengamati secara langsung dan cermat terhadap perilaku individu. Karena dengan teknik ini segala tingkah laku dan aktivitas subyek penelitian sehari-sehari bisa

---

[21] Sanpiah Faisal, *Penelitian Kualitatif; Dasar dan Aplikasinya* (Malang: Y. A. J, 1990), 19.
[22] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2005), 60.
[23] Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Cet. I* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui, sebab dengan observasi merupakan alat yang ampuh untuk menguji suatu kebenaran.

Dalam observasi ini dibutuhkan kamampuan peneliti secara optimal baik dari segi motif, kepercayaan, perhatian, kebebasan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, untuk dapat berpartisipasi di tempat lokasi penelitian dengan maksud untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka peran aktif peneliti di lapangan sangat diperlukan.

Sejalan dengan hak tersebut, peneliti terlibat langsung dalam penelitian. Langkah yang diambil pada tahap ini adalah melakukan pengamatan atas peranan kepemimpinan ketua NU dalam mewujudkan *good governance* (studi kasus di desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo). Dimana peniliti mengamati kepemimpinan ketua NU dalam mewujudkan *good governance* di desa sumorame.

b. Wawancara (*Interview*)

Selain metode observasi, agar data bisa terkumpul sesuai dengan apa yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara (*Interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal, yaitu semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal.[24]

[24] S. Nasution, *Metode Research, Edisi I* (Bandung: Jemmars, 1982), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain metode kualitatitf deskriptif, agar data bisa berkumpul sesuai dengan yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik wawancara. Wawancara ini merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua orang pihak yaitu wawancara yang menggunakan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Jenis wawancara yang digunakan *In-depth interview* adalah wawancara secara langsung terhadap seorang responden dengan menggunakan teknik probing oleh seseorang pewawancara yang ahli.[25] Tujuan dilakukan teknik ini adalah untuk mengungkap data yang sangat susah dilakukan dengan interview biasa, karena menyangkut informasi yang sensitif seperti menyangkut strategi politik, kepercayaan, maupun keyakinan. Yang akan diteliti menggunakan metode wawancara *in-depth interview* adalah informan dalam penelitian ini, yaitu para ketua NU beserta pengurus NU,dan juga beberapa warga nahdliyin setempat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.[26] Dokumentasi dibagi menjadi dokumentasi pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan

---

[25] Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 135.
[26] *Ibid.*, 216 - 217

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepercayaannya.[27] Dokumen jenis ini bisa berupa buku biografi tokoh yang merekam *track record* tokoh yang diteliti ataupun orang lain yang menulis biografi tokoh, buku harian, dan surat pribadi. Dokumen resmi adalah dokumen yang terbagi atas dokumen internal dan eksternal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan lembaga masyarakat tertentu. Dokumen eksternal berupa majalah, buletin, pernyataan atau berita yang disiarkan media massa.[28]

6. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif itu haruslah ilmiah untuk menjaga keilmiaan tersebut dapat dilihat data yang ada karena kesalahan mungkin saja terjadi dalam menggali data.

Maka dalam hal ini untuk mengurangi atau menanggulangi kesalahan data tersebut, maka pemeliti menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti berarti peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai pengumpulan data tercapai sehingga sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam latar belakang penelitian. Agar dapat meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan peneliti dengan perpanjangan keikutsertaannya akan banyak

[27] *Ibid.*, 217
[28] *Ibid.*, 219

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperlajari keadaan dan kebiasaan dapat menguji kebenaran, informasi dan membangun kepercayaan subyek.[29]

b. Ketekunan Pengamat

Ketekunan pengamat berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh dan mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan pengamat bermaksud menemukan suatu ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan-persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan itu menyediakan kadalaman.[30]

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber, metode penyelidikan dan teori.

1) Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitas. Hal ini dapat

---

[29] *Ibid.*, 327
[30] Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 329

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicapai dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara yang berkaitan.

2) Triangulasi dengan metode, dalam hal ini terdapat 2 strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dan metode yang sama.
3) Dengan penyelidikan yaitu memanfaatkan pengamatan lain untuk derajat kepercayaan data.
4) Triangulasi dengan teori, maksudnya dari teori ini adalah pengecekan derajat kepercayaan dengan cara membandingkan dengan suatu teori atau lebih.[31]

d. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Dalam upaya lebih jelas dan mudah peneliti dalam melakukan sebuah penelitian dan mengecek data yang begitu banyak di lapangan. Maka dirasa perlu oleh peneliti untuk melakukan diskusi kepada teman sejawat yang nantinya mengerti terhadap persoalan yang peneliti hadapi.

Ini semua dilakukan untuk meperoleh masukan terhadap apa yang selama ini peneliti lakukan dalam arti jika ada kemencengan data maka segera peneliti mendapatkan semacam petunjuk gambaran tentang langkah-langkah peneliti selanjutnya dalam penelitian.[32]

---

[31] *Ibid.*, 330-332
[32] *Ibid.*, 333

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini tentang peranan kepemimpinan ketua NU dalam mewujudkan *good governance* (studi kasus di desa Sumorame, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo), maka peneliti berpijak pada tahapan-tahapan yang dikemukakan oleh Bogdan (1972) yang terdiri dari dua tahapan, yaitu:

a. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap berikutnya yang dilakukan peneliti adalah tahap pekerjaan lapangan. Pada tahap ini dibagi atas tiga bagian yaitu memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperanserta sambil menggumpulkan data.[33]

Bagian pertama memahami latar penelitian dan persiapan diri ada beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain pembatasan latar dan penampilan dalam menyiapkan diri, penampilan dari peneliti, pengenalan hubungan peneliti di lapangan, jumlah waktu dalam penelitian.

Bagian kedua memasuki lapangan beberapa langkah yaitu keakraban hubungan antara peneliti dengan subyek yang diteliti yang sudah melebur sehingga tidak ada dinding pemisah di antara keduanya, mempelajari bahasa yang digunakan oleh subyek peneliti, peranan peneliti sangat penting dalam penelitian dalam mendekati subyek penelitian.

---

[33] *Ibid.*, 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagian ketiga berperan serta sambil mengumpulkan data dapat melalui pengarahan batas penelitian, mencatat data, petunjuk tentang cara mengingat data, kejenuhan, keletihan dan istrirahat, meneliti suatu latar yang didalamnya terdapat pertentangan, analisis di lapangan.

b. Tahap Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data oleh peneliti ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan rumusan hipotesis kerja seperti yang dirasakan.[34]

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data menurut Miles dan Huberman dalam buku (*Qualitative Data Analisis*, 1986). Pada dasarnya analisis data ini didasarkan pada pandangan pradigma yang posistivisme.

Analisis data itu dilakukan dengan mendasarkan diri pada penelitian lapangan apakah satu atau lebih dari satu situs. Jadi seorang analis sewaktu hendak mengadakan analisis data harus menelaah terlebih dahulu apakah pengumpulan data yang dilakukannya satu situs atau dua situs atau lebih dari dua situs. Atas dasar pemahaman tentang adanya situs penelitian itu kemudian diadakan pemetaan atau diskripsi tentang data itu ke dalam apa yang dinamakan matriks. Dengan memanfaatkan matriks yang dipetakan maka peneliti mulai

[34] S. Nasution, *Metode Research, Edisi I*, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadakan analisis apakah membandingkan, melihat urutan ataukah hubungan sebab akibat.[35]

Menurut Miles dan Haberman analisis data penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:[36]

a) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data"kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama kegiatan penelitian berlangsung di lapangan. Bahkan sebelum data benar-benar terkumpul, antisipasi akan adanya reduksi data sudah nampak. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi berikutnya yaitu membuat ringkasan, mengkode, melusur tema, membuat gugus-gugus, membuat pemilihan data, menulis memo. Reduksi data ini berlanjut terus sesudah penelitian di lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

b) Peyajian Data

Penyajian yang paling sering digunakan pada masa lalu adalah bentuk teks naratif. Dalam penelitian kita mendapatkan data yang amat banyak. Data tersebut tidak praktis bila disajikan semua. Teks tersebut kadang masih terpencar-pencar, tidak simultan, tersusun kurang baik dan kadangkala berlebih-lebihan. Peneliti tidak boleh

[35] Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* 307-308.
[36] Yulius Slamet, *Metode Penelitian Sosial*, 140-1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil kesimpulan yang gegabah, menyingkirkan hal-hal yang tidak perlu, mengadakan pembobotan, menyeleksi.

c) Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Kegiatan analisis yang ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan adalah hanya sebagian sebagian dri konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung yaitu dengan merefleksi kembali apa yang telah kembali ditemukan serta bertukar pikiran dengan temat sejawat untuk memperoleh kebenaran.

H. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari beberapa komponen yang sistematis dalam bentuk bab per bab, dan antara satu bab dengan bab yang lain terdapat keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Adapun kerangka jelasnya sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua membahas tentang pengertian kepemimpinan, beberapa teori kepemimpinan serta pengertian *good governance*, dan prinsip – prinsip *good governance*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum obyek penelitian mulai dari keadaan geografis desa Sumorame, kondisi obyektif desa Sumorame, latar belakang berdirinya NU, struktur organisasi NU di ranting Sumorame.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan analisis data yang berisi tentang langkah – langkah yang dilakukan ketua NU dalam menjalankan fungsinya, implementasi prinsip – prinsip *good governance* yang dilakukan ketua NU serta dampak implementasi *good governance*.

Bab kelima merupakan bab terakhir atau penutup dari penelitian ini yang berisi kesimpulan dari penelitian dan dilengkapi dengan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Kepemimpinan

1. Definisi Kepemimpinan

Kegiatan manusia secara bersama-sama, selalu membutuhkan kepemimpinan, jadi harus ada pemimpin demi sukses dan efisiensi kerja. Keharusan membentuk pemimpin dimulai dari kesadaran manusia bahwa dalam sebuah komunitas pasti membutuhkan seorang panutan, teladan, pengarah, dan pengayom, demi menjaga tatanan sosial kebangsaan.

Ada beberapa pendapat yang memberikan pengertian kepemimpinan diantaranya : menurut Goerge R. Ferry (dalam bukunya *Principle Of Management*) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk bersedia berusaha mencapai tujuan bersama.[1] Sedangkan menurut Howard H. Hoyt dalam bukunya (*Aspect of Modern Public Administration*) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia, kemampuan untuk membimbing orang.

Dari definisi di atas menunjukkan adanya suatu kesamaan pandangan bahwa kepemimpinan melibatkan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, dengan memberikan dorongan, baik itu dari kecakapan dalam berkomunikasi maupun dari aspek yang lain.

---

[1] George R. Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara,1993), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, dari pengertian kepemimpinan itu, untuk melakukan penelitian terhadap pola kepemimpinan seorang pemimpin, selain harus membedah tentang teori kepemimpinan, peneliti juga harus mampu memahami bagaimana pola komunikasi pemimpin tersebut sehingga mampu mempengaruhi dan membimbing orang-orang yang berada dibawah kekuasaanya.

2. Teori-teori Kepemimpinan

Banyak orang telah melakukan penelitian dan studi tentang kepemimpinan, dan hasilnya berupa macam-macam teori tentang kepempimpinan muncul. Namun, yang dimaksud dengan teori kepemimpinan itu sendiri adalah penggeneralisasian satu seri perilaku pemimpin dan konsep-konsep kepemimpinannya, dengan menonjolkan latar belakang historis, sebab-musabab timbulnya kepemimpinan, persyaratan menjadi pemimpin, tugas pokok dan fungsinya, serta etika profesi kepemimpinan.[2]

Teori kepemimpinan pada konsep yang dikemukakan oleh Stephen Covey,[3] konsep ini menekankan bahwa seorang pemimpin harus memiliki empat fungsi kepemimpinan, yaitu :

a) Perintis (*pathfinding*)

Konsep ini mengungkap bagaimana upaya sang pemimpin memahami dan memenuhi kebutuhan utama para *stakeholder*- nya, misi dan nilai-nilai yang dianutnya, serta

[2] Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 1998), 27.
[3] Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad SAW The Super Leader Super Manager* (Jakarta: PLM, 2007), 20-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkaitan dengan visi dan strategi, yaitu gimana organisasi akan dibawa dan bagaimana caranya agar sampai pada tujuanya.

b) Penyelaras (*aligning*)

Berkaitan dengan bagaimana pemimpin menyelaraskan keseluruhan sistem dalam organisasi agar mampu bekerja dan saling sinergis.

c) Pemberdaya (*empowering*)

Berhubungan dengan upaya pemimpin dalam menumbuhkan lingkungan agar setiap orang dalam organisasi mampu melakukan yang terbaik dan selalu mempunyai komitmen yang kuat.

d) Panutan (modeling)

Mengungkap bagaimana agar pemimpin dapat menjadi panutan bagi para bawahanya.

3. Gaya Kepemimpinan

Selain menggunakan teori-teori kepemimpinan, ada sebuah pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami suksesnya kepemimpinan, yaitu dengan menggunakan pendekatan pada gaya yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam berbagai macam situasi :

Adalah Ralph White dan Ronald Lippitt yang mengemukakan skema tentang tiga macam gaya kepemimpinan[4], yaitu :

[4] Winardi, *Kepemimpinan dalam Manajemen* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Otoriter, yang mempunyai maksud bahwa semua determinasi "*policy*" dilakukan oleh pemimpin.

b. Demokratis, yang mengandung arti bahwa semua "*policiess*" merupakan bahan pembahasan kelompok dan keputusan kelompok yang dirangsang dan dibantu oleh pemimpin.

c. *Laissez – Faire,* yaitu bahwa kebebasan lengkap untuk keputusan kelompok atau individual dengan minimum partisipasi pemimpin.

B. GOOD GOVERNANCE

1. Pengertian *Good Governance* (Kepemerintahan Yang Baik)

Istilah *good and clean governance* merupakan wacana baru dalam ilmu politik. Ia muncul pada awal 1990-an. Secara umum istilah *good and clean governance* memiliki pengertian akan segala hal yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.[5]

Pierre Landell-Mills dan Ismael Seregeldin mendifinisikan *good governance* sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi.[6] Robert Charlick mengartikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan atau

[5]Komaruddin Hidayat, Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 173.

[6] Pandji Santosa, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.[7]

Di Indonesia, substansi wacana *good governance* dapat dipadankan dengan istilah pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Pemerintahan yang baik adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh berbagai tingkatan pemerintahan Negara yang berkaitan dengan sumber-sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Dalam prakteknya disebut pemerintahan yang bersih (*clean government*), adalah model pemerintahan yang efektif, efesien, jujur, transparansi dan bertanggung-jawab.[8]

Berikutnya secara konseptual pengertian kata baik (*good*) dalam istilah kepemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman:

1) Nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
2) Aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif, efesien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan.

Lembaga Administrasi Negara (2000) menyimpulkan bahwa wujud *Good Governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efesien, dengan menjaga

---

[7] *Ibid.*
[8] Azyumardi Azra, *Civic Education*, 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"kesinergisan" interaksi yang konstruktif di antara domain-domain Negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam buku Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) menyatakan bahwa tata kepemerintahan yang baik secara tersurat maupun tersirat tertuang dalam tata nilai penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang meliputi prinsip-prinsip: supremasi hukum, keadilan, kesetaraan, transparansi, desentralisasi, kebersamaan, profesional, cepat tanggap, efektif dan efesien, berdaya saing, dan akuntabel (LANRI, 2003).[9]

Selanjutnya Lembaga Administrasi Negara mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada:

Pertama, orientasi ideal Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan Nasional. Orientasi ini mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti: *legitimacy* (apakah pemerintah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyat), *accountability scuring of human civilan control. Kedua,* pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efesien dalam melakukan upaya mencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bergantung pada sejauh mana pemerintahan mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta sejauh mana mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efesien.[10]

2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

[9] Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan,* 276.
[10] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk merealisasikan pemerintahan yang profesional dan akuntabel yang bersandar pada prinsip-prinsip *good governance*, Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek fundamental dalam *good governance* yang harus diperhatikan, atau syarat bagi terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih, yaitu:[11]

1) Partisipasi (*participation*)

Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Atau setiap pembuatan peraturan dan atau kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat (melalui wakil-wakilnya). Bentuk partisipasi tersebut dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.

2) Penegakan Hukum (*rule of law*)

Harus ada pengakuan hukum yang menindak para pelanggar, menjamin perlindungan HAM, tidak memihak, berlaku pada semua warga. Tanpa kepastian dan aturan hukum, proses politik tidak akan berjalan dan tertata dengan baik.

Sehubungan dengan hal tersebut, realitas wujud *good governance*, harus diimbangi dengan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

---

[11] Azyumardi Azra, *Civic Education*, 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

a. Supremasi hukum (*supremacy of law*), yakni setiap tindakan unsur-unsur kekuasaan Negara, dan peluang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum dan aturan yang jelas dan tegas.

b. Kepastian hukum (*legal certainty*), bahwa setiap kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain.

c. Hukum yang responsif, yakni aturan-aturan hukum disusun berdasarkan aspirasi masyarakat luas, dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil.

d. Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminasi, yakni penegakan hukum berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu.

e. Independensi peradilan, yakni peradilan yang independen bebas dari pengaruh penguasa atau kekuatan lainnya.

3) Transparansi (*transparency*)

Adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan. Ada ketegasan antara rahasia Negara dengan informasi yang terbuka untuk publik.

Dalam pengelolaan Negara terdapat delapan unsur yang harus dilakukan secara transparansi, yaitu:

Pertama, penetapan posisi, jabatan, atau kedudukan. *Kedua,* Kekayaan pejabat publik. *Ketiga,* Pemberian penghargaan. *Keempat,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan. *Kelima,* Kesehatan. *Keenam,* Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik. *Ketujuh,* Keamanan dan ketertiban. *Kedelapan,* Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

Dalam hal penetapan posisi jabatan publik harus dilakukan melalui mekanisme *test and proper test* (uji kelayakan) yang dilakukan oleh lembaga-lembaga independent. Uji kelayakan bisa dilakukan oleh lembaga legislatif maupun komisi independent, seperti komisi yudisial, komisi kepolisian, komisi pajak, dan sebagainya.

4) Responsif (*responsiveness*)

Lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan "*basic needs*" (kebutuhan dasar) dan HAM. Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, tetapi pemerintah harus proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

5) Konsensus (*consensus*)

Asas konsensus adalah jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog atau musyawarah menjadi konsensus. Cara pengambilan keputusan konsensus, selain dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak, cara ini akan mengikat sebagian besar komponen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan tersebut.

6) Persamaan Hak

Pemerintahan harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa kecuali, dilibatkan di dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan. Asas persamaan hak ini mengharuskan setiap pelaksanaan pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal pelayanan publik tanpa mengebal perbedaan keyakinan, suku, jenis kelamin, dan kelas sosial.

7) Efektivitas (*effectiveness*) dan Efesiensi (*eficiency*)

Pemerintah harus efektif dan efesien dalam memproduksi *output* berupa aturan, kebijakan, dan pengelolaan keuangan Negara.

Kriteria efektivitas biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau seberapa besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Sedangkan, efisiensi umumnya diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Semakin kecil biaya yang tercapai untuk kepentingan yang terbesar, maka pemerintahan tersebut dalam kategori pemerintahan yang efisien.

8) Akuntabilitas (*accountability*)

Suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Setiap pejabat publik dituntut untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Inilah yang dituntut dalam asas akuntabilitas dalam upaya menuju pemerintahan yang besrsih dan berwibawa.

9) Visi Strategis (*strategic vision*)

Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Dengan kata lain, kebijakan apa pun yang kan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh atau duapuluh tahun kedepan. Tidak sekedar memiliki agenda strategis untuk masa yang akan datang, seorang yang menempati jabatan publik atau lembaga profesional lainnya harus mempunyai kemampuan menganalisis persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang dipimpinnya. Oleh karena itu, implementasi kesemuanya, sangat dibutuhkan sebagai syarat bagi terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance)* dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

3. Upaya Mewujudkan *Good Governance*

Salah satu agenda pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih, dan berwibawa, yang merupakan upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan dan pembangunan.[12] Sejalan dengan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat merupakan salah satu tujuan dari implementasi *good governance*. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan lembaga pemerintahan pada akhirnya akan melahirkan kontrol masyarakat terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan. Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik, efektif, dan bebas dari KKN.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip pokok *good and clean governance*, setidaknya dapat dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yaitu: [13]

1) Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan.

   Penguatan peran lembaga perwakilan rakyat, mutlak dilakukan dalam rangka peningkatan fungsi mereka sebagai pengontrol jalannya pemerintahan. Selain melakukan *checks and balances*, lembaga legislatif harus pula mampu menyerap dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat kepada lembaga legislatif.

2) Kemandirian lembaga peradilan.

   Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa berdasarkan prinsip *good and clean governance* peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum dan kemandirian lembaga peradilan mutlak dilakukan. Akuntabilitas aparat penegak hukum dan

---

[12] Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan* (*Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik*), 302.

[13] Azyumardi Azra, *Civic Education*, 179-180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembaga yudikatif merupakan pilar yang menentukan dalam penegakan hukum dan keadilan.

3) Profesionalitas dan integrasi aparatur pemerintah.

Perubahan paradigma aparatur negara dari birokrasi elitis menjadi birokrasi populis (pelayan rakyat) harus dibarengi dengan peningkatan profesionalitas dan integrasi moral jajaran birokrasi pemerintah. Akuntabilitas jajaran birokrasi akan berdampak pada naiknya akuntabilitas dan legitimasi birokrasi itu sendiri. Aparatur birokrasi yang mempunyai karakter tersebut dapat bersinergi dengan pelayanan birokrasi secara cepat, efektif, dan berkualitas.

4) Penguatan partisipasi masyarakat madani (*civil society*)

Peningkatan partisipasi masyarakat adalah unsur penting lainnya dalam merealisasikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik mutlak dilakukan dan difasilitasi oleh negara (pemerintah). Peran aktif masyarakat dalam proses kebijakan publik pada dasarnya dijamin oleh prinsip-prinsip HAM. Masyarakat mempunyai hak atas informasi, hak untuk menyampaikan usulan, dan hak untuk melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Kritik dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga perwakilan, pers maupun dilakukan secara langsung lewat dialog-dialog terbuka dengan jajaran birokrasi maupun organisasi sosial lainnya.

5) Peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk merealisasikan prinsip-prinsip *good and clean governance*, kebijakan otonomi daerah dapat dijadikan sebagai media transformasi perwujudan model pemerintahan yang menopang tumbuhnya kultur demokrasi di Indonesia.

Lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah memberikan kewenangan pada daerah untuk melakukan pengelolaan dan memajukan masyarakat dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam kerangka menjaga keutuhan NKRI. Dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, pencapaian tingakt kesejahteraan dapat diwujudkan secara lebih cepat yang pada akhirnnya akan mendorong kemandirian masyarakat.

4. Pemerintahan Daerah Yang Baik (*Good Local Governance*)

Selain bukan menjadi monopoli pemerintah, konsep *good governance* tentunya tidak hanya perlu diaplikasikan di tingkat nasional, tetapi bahkan lebih penting lagi adalah di tingkat lokal, Daerah maupun Desa. Secara umum, berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah akan membawa perubahan sangat mendasar dalam sistem kewenangan pemerintahan dalam aspek kesisteman di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota dan Desa). Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, provinsi otonomi menjadi lebih lengkap, khususnya untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daerah kabupaten/Kota dan Desa yaitu: Kewenangan otonomi yang luas, Nyata, dan bertanggungjawab.[14]

Pada dasarnya, hakekat otonomi daerah, diantaranya adalah diharapkan kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah, serta proses interaksi antara pemerintah dan institusi daerah lainnya, serta dengan masyarakat secara optimal.

Dalam rangka mewujudkan kepemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) melalui penataan kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka kebijakan dalam penataan kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah lebih diarahkan pada upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah untuk menyempurnakan dan mengembangkan organisasi dengan lebih proporsional, transparansi, hierarki pendek, serta terdesentralisasi kewenangannya.[15]

Upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik di daerah (*good governance*) merupakan senergi dari pelaksanaan seluruh prinsip kepemerintahan yang baik yaitu: partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi terhadap konsensus, keadilan, efektifitas dan efesiensi, visi strategis serta

---

[14]Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan, (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik)*, 319.
[15] *Ibid.*, 327.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akuntabilitas, yang merupakan asas umum penyelenggaraan Negara, baik di pemerintah pusat maupun daerah.

Dengan demikian behasil atau tidaknya pemerintah dalam mengupayakan terwujudnya kepemerintahan yang baik ditentukan oleh seberapa besar prinsip kepemerintahan yang baik tersebut diimplementasikan secara maksimal, sehingga dicapai kualitas pelayanan yang baik dan kesejahteraan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
SETTING PENELITIAN

A. Gambaran Umum

a. Keadaan Geografis

Desa Sumorame adalah satu desa yang terletak di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang letaknya ± 2 KM sebelah selatan dari Kecamatan Candi, jarak dari Kabupaten Sidoarjo ± 5 KM, adapun luas wilayah Desa Sumorame adalah 113.900 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Sugih Waras

Sebelah Selatan : Desa Boro/Ngaban

Sebelah Barat : Desa Karang Tanjung

Sebelah Timur : Desa Ngampelsari

Berdasarkan letak ketinggian, Desa Sumorame berada pada ± 4 m dari permukaan air laut. Dan sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis, Desa Sumorame memiliki dua musim, yaitu; musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan biasanya terjadi pada bulan November sampai bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan April sampai bulan Oktober.

Desa Sumorame merupakan desa yang tergolong kecil bila dibandingkan dengan wilayah lain di Kecamatan Candi. Desa ini dibagi dalam 2 (dua) Dusun, dusun Sumotuwo, dan dusun Kramean

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Keadaan Demografis

Dari hasil data penduduk tahun 2010, Desa Sumorame ini termasuk Desa yang tidak begitu padat penduduknya dengan pertimbangan luas wilayah Desa tersebut. Jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 7429 jiwa dengan 2131 kepala keluarga (KK) sebagai berikut :

Tabel 3.1

Penduduk Desa Sumorame

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Kepala Keluarga (KK)	2131
2	Laki-laki	3613
3	Perempuan	3816
	Jumlah	7429

Sumber : monografi Desa Sumorame, September 2010.

Berdasarkan tabel diatas dan berbicara mengenai penduduk tidak terlepas dari wilayah orang yang menempati wilayah tertentu. Oleh karena itu, penduduk adalah semua orang yang tinggal dalam suatu wilayah, yang dapat dikelompokkan berdasarkan umur, agama, jenis kelamin, jenjang pendidikan, dan lain sebagainya. Desa Sumorame mempunyai jumlah penduduk 7429 jiwa dengan rincian sebagai berikut: Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3613 jiwa, Jumlah, penduduk perempuan sebanyak 3816 jiwa, Jumlah kepala keluarga sebanyak 2131 jiwa.

Masyarakat Desa Sumorame secara keseluruhan mempunyai kesamaan agama yakni agama Islam, didalamnya terdapat suatu organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial untuk mencapai tujuan bersama dalam lingkup desa. Sehingga adanya potensi masyarakat sangatlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendukung dalam pembangunan masyarakat dan pemerintahan desa. Adapun jumlah penduduk menurut umur adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Jumlah Penduduk Menurut Umur

No	Umur	Jumlah
1	00 – 03	643
2	04 – 06	571
3	07 – 12	928
4	13 – 15	574
5	16 – 18	492
6	19 – keatas	4221

Sumber : Monografi Desa Sumorame, September 2010.

Bedasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang ada di Desa Sumorame berdasarkan kelompok umur, berjumlah 7429 jiwa dengan perincian penduduk yang berumur 0-03 sebanyak 643 jiwa, 04-06 571 jiwa, 07-12 928 jiwa, 13-15 574 jiwa, 16-18 492 jiwa, dan 19-keatas sebanyak 4221 jiwa. Berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian dari jumlah penduduk tersebut yang mendominasi adalah umur 19-keatas, hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang berumur 19-keatas lebih banyak dari jumlah penduduk yang lain.

B. Kondisi Obyektif Desa Sumorame

1. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Desa Sumorame selalu hidup bertetangga antara warga yang satu dengan warga yang lainnya. Kondisi sosial yang berkembang di Desa Sumorame hampir sama dengan seluruh desa di Kecamatan Candi. Mayoritas warga desa Sumorame adalah beretnis dengan karakter umum masyarakat yang dinamis dan ekspresif. Sebagian besar warga desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumorame beragama Islam, sebagaimana masyarakat desa di Kecamatan lain.

Kehidupan keagamaan yang kental Islamnya telah membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Beberapa kegiatan sosial yang dapat dilihat di Desa Sumorame antara lain: Adanya kerja bakti (gotong-royong) yang dilakukan biasanya untuk mengerjakan sarana-sarana umum seperti pembangunan dan perbaikan sarana ibadah, pembangunan jembatan, jalan, dan lain-lain.

Adanya ta'ziyah terhadap orang yang meninggal mulai dari penguburan sampai hari ketujuh oleh masyarakat untuk membacakan tahlil. Adanya kegiatan-kegiatan pengajian yang diadakan setiap malam jum'at oleh jama'ah wirid, yasinan maupun jama'ah lainnya. Adanya kegiatan ibu-ibu Muslimat yang diadakan satu bulan sekali, arisan, dan kegiatan-kegiatan yang lain.

2. Kondisi Pendidikan

Dilihat dari keadaan sosial pendidikan, masyarakat Desa Sumorame tergolong masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap dunia pendidikan yang cukup baik. Dilihat dari jumlah sarana pendidikan yang ada di desa Sumorame, mereka sangat bersemangat melanjutkan pendidikannya baik dalam maupun ke luar Desa. Hal ini dapat dilihat dari data berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.3

Sarana Pendidikan Desa Sumorame

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	5
2	SD	1
3	MA	1
4	DINIYAH	4

Sumber : Monografi Desa Sumorame, September 2010

Pada tabel di atas diketahui bahwa sarana pendidikan di desa Sumorame cukup memadai pada tingkatan desa. Seperti yang di sebutkan dalam tabel di atas, 1 buah MA, SD 1 buah, 5 buah TK dan 4 buah Diniyah. Sarana pendidikan tersebut dalam tingkat desa bisa dibilang cukup memadai, untuk mengembangkan pendidikan masyarakat desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Akan tetapi fasilitas sarana pendidikan ditingkat desa khususnya desa Sumorame kurang memadai, sehingga anak-anak desa Sumorame kurang kreatif.

Sejalan dengan arus globalisasi dan informasi, kesadaran masyarakat Desa Sumorame terhadap pentingnya pendidikan mengalami kemajuan yang signifikan, tidak sedikit yang melanjutkan ke perguruan tinggi baik dalam kota ataupun luar kota. Adapun jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan warga masyarakat desa Sumorame adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	TK	175
2	SD	2182
3	SMP/MTS	1816
4	SMA/MA	917
5	Diniyah	85
6	Akademi	319
7	Perguruan Tinggi	147

Sumber : Monografi Desa Sumorame September 2010.

Pada tabel di atas diketahui distribusi tingkat pendidikan masyarakat desa Sumorame mayoritas adalah TK sebanyak 175, kemudian disusul SD 2182, dan SMP/MTS sebanyak 1816, sedangkan SMA/MA sebanyak 917, di tingkat Diniyah 85, akademi 319, dan Perguruan tinggi sebanyak 147 orang.

Dengan demikian, dari keseluruhan masyarakat Desa Sumorame yang berjumlah 7429 jiwa, maka 5641 jiwa pernah mengenyam pendidikan, dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.

3. Kondisi Ekonomi

Penduduk Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagian besar bekerja dalam bidang, pertanian, pedagang, pengusaha, PNS, pemulung, TNI/POLRI, di samping itu juga sebagian bekerja sebagai tukang kayu atau tukang bangunan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.5

Mata Pencaharian Penduduk Desa Sumorame

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Karyawan Swasta	2932
2	Pedagang	651
3	Pertukangan	174
4	PNS	167
5	Tani	118
6	TNI/POLRI	43
7	Pemulung	13

Sumber : Monografi Desa Sumorame, September 2010

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa di desa Sumorame memiliki segmentasi jumlah penduduk menurut mata pencaharian. Jenis pekerjaan di atas menggambarkan tingkat ekonomi di desa Sumorame. Mayoritas warga masyarakat bekerja sebagai karyawan swasta yang menempati urutan pertama yaitu 2932, hal ini disebabkan karena semakin sempitnya lahan pertanian di desa Sumorame yang dijadikan sebagai lahan pemukiman sehingga masyarakat Sumorame banyak yang beralih profesi sebagai karyawan swasta. jumlah penduduk kedua adalah yang mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang sebanyak 651, serta ada juga diantara mereka yang bekerja sebagai PNS, TNI/POLRI dan juga bekerja sebagai tani.

4. Kondisi Keagamaan

Masyarakat Desa Sumorame seluruhnya adalah beragama Islam. Islam adalah agama mayoritas dengan kultur santri (Nahdhatul Ulama, NU). Masyarakat desa Sumorame sebagaimana masyarakat Sidoarjo pada umumnya, bercorak budaya Islam, walaupun tidak terintegrasi secara total dengan budaya masyarakat. Hal ini di latar belakangi oleh didikan agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang kuat baik itu dari orang tua mapun dari lembaga pendidikan keagamaan yaitu; Taman pendidikan Al-Qur'an yang tersebar di desa Sumorame dan kemudian dilanjutkan ke jenjang Diniyah. Ketaatan terhadap nilai-nilai religius dan perhatian yang lebih terhadap kepentingan agama oleh masyarakat Desa Sumorame dapat dilihat dari sarana-sarana peribadatan yang ada, sebagai berikut :

Tabel 3.6

Jumlah Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	4
2	Mushollah/Langgar	15
3	Gereja	-
4	Vihara	-
5	Pura	-

Sumber : Monografi Desa Sumorame September 2010.

Pada tabel di atas terlihat bahwa sarana ibadah yang ada di desa Sumorame sesuai dengan jumlah pemeluk agama Islam, sehingga tempat ibadah dijumpai adalah Langgar 15 buah yang merupakan simbol keagamaan masyarakat , dan 4 Masjid. Sedangkan untuk gereja, vihara, dan juga pura tidak ada sama sekali karena pemeluk agama non islam merupakan pendatang baru yang ada di desa.

Dalam kehidupan keagamaan masyarakat desa Sumorame memiliki simbol-simbol keagamaan seperti: *langgar* (tempat ibadah umat Muslim serupa surau), *masjid* (tempat ibadah yang berukuran lebih besar daripada *langgar*), Tempat ibadah sebagai tempat untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan juga digunakan untuk ceramah agama atau kegiatan sosial

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti memperingati maulid Nabi, pembagian zakat, dan tempat pengajian, dan *madrasah* (lembaga pendidikan semacam sekolah).

C. Sekilas Mengenai NU

1. Sejarah berdirinya NU

Keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisional, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 tersebut dikenal dengan "Kebangkitan Nasional". Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya,muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi sosial keagamaan di Indonesia yang pembentukannya merupakan kelanjutan perjuangan kalangan pesantren dalam melawan kolonialisme di Indonesia. NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh sejumlah ulama tradisional yang diprakarsai oleh KH. Hasyim Asy'ari. Organisasi ini berakidah Islam menurut paham Ahlussunah wal Jama'ah. Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti Nahdlatul Wathan (Kebangkitan Tanah Air) pada1916.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian pada tahun1918didirikan Taswirul Afkaratau dikenal juga dengan "Nahdlatul Fikri" (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan Nahdlatut Tujjar, (pergerakan kaum saudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar itu, maka Taswirul Afkar, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.[1]

Perkembangan politik di Timur Tengah yang terjadi di awal abad ke-20 ditandai dengan tampilnya tokoh-tokoh Islam penganut Ajaran Abdul Wahab dengan ajarannya yang terkenal "Aliran Wahabi", yakni berubahnya sistem pemerintahan di Turki dari kesultanan ke sistem kerajaan di bawah pimpinan Mustafa Kemal (penganut Wahabi), dan berdiri serta berpengaruhnya pemerintahan golongan Wahabi dibawah kepemimpinan RajaIbnu Sa'ud di Jazirah Arab dan kota Mekkah.

Pada masa Raja Sa'ud ini berkuasa, ia melakukan gerakan-gerakan modernisme Islam secara radikal terhadap tatanan keagamaan dan masyarakat Islam di kawasan itu, termasuk adanya upaya-upaya melakukan perombakan terhadap kuburan empat imam(Sayafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi) yang terletak di sekitar Ka'bah.

Selain itu reaksi para ulama penganut Ahlussunah wal Jama'ah terhadap pemerintahan kaum Wahabi saat itu, adalah karena

[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_ulama/Februari 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikahawatirkan kaumWahabi tidak memberi kebebasan bagi masyarakat untuk melakukan ibadah sesuai dengan tradisional atau ajaran salah satu dari empat mazhab.[2]

Gerakan itu diwariskan oleh seseorang yang bernama Abd Al-Wahab(1073-1787), yang berupaya melakukan pemurnian ajaran Islam, karena ia menganggapnya bahwa ajaran Sufisme telah menciptakan kemerosotan dikalangan umat Islam, telah menyelewengkan ajaran Islam, termasuk serangannya terhadap ajaran-ajaran dari empat imam mazhab. Menurut kalangan Wahabi banyak dari ajaran empat mazhab itu yang setelah ditelusuri tidak terdapat di dalam Al Qur'an dan Hadist, seperti masalah taqlid dan ijtihad, ziarah kuburan, bacaan barzanji, pemberian pelajaran bagi jenazah yang baru meninggal (talqin), soal selamatan bagi orang yang telah meninggal, dan lain-lain. Tradisional semacam itu dianggap berdampak terhadap tingkat masalah keimanan dan masalah-masalah keduniaan.

Sebagai akibatnya umat Islam menjadi terbelakang, tertinggal dari kemajuan yang dicapai dunia Barat, karena penolakannya terhadap nilai-nilai modernisme.

Gerakan Wahabi dapat bertahan, berkembang dan merasuki ideologi kenegaraan, bahkan kemudian memenangkan percaturan politik di Timur Tengah, dengan tokoh penyebar misi gerakan itu yang terkenal pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 adalah Muhammad Abduh.

---

[2] Laode Ida, *Anatomi Konflik NU, Elit Islam, dan Negara* (Jakarta: PustakaSinar Harapan,1996), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

AjaranWahabiyah melalui tokoh tersebut cukup berpengaruh di kalangan orang-orang Indonesia yang berkesempatan belajar Islam di Timur Tengah, ditambah dengan pengaruh kemenangan golongan Wahabiyah di bawah kepemimpinan Raja Sa'ud di Arab Saudi.[3]

Deliar Noer, misalnya mencatat paling tidak ada tujuh orang penyebar Islam ternama dari Sumatera Barat yang terpengaruh kuat dengan ajaran-ajaran modernisme Islam ala Wahabiyah dan Muhammad Abduh yang hidup di penghujung abad ke-19 dan pada awa abad ke-20, yaitu Syaikh Muhammad Khatib, Syaikh Taher Djalaludin, Syaikh Muhammad Djamil Djambek, Abdul Karim Amirullah, Haji Abdullah Ahmad, Syaikh Ibrahim Musa, dan Zainuddin Labai Al-Junusi, dimana mereka melakukan syiar Islam baik secara langsung maupun melalui pertemuan tatap muka, lembaga-lembaga pendidikan, maupun secara tidak langsung melalui tulisan mereka di dalam majalah. Sehingga di daerah itu terjadi ketegangan antara kalangan penganut-penganut Islam tradisionalonal atau kalangan pesantren dan kalangan tokoh-tokoh adat dengan kalangan pembaharu.

Sementara itu di Pulau Jawa, pada awal abad ke-20 mulai pula terjadi ketegangan karena munculnya gerakan Islam pembaharu yang bisa disebut sebagai perpanjangan gerakan Wahabiyah dari Timur Tengah. Adalah organisasi Muhammadiyah, yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan, dimana ia didorong

---

[3] *Ibid.*, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh kalangan murid-muridnya untuk mendirikan organisasi lembaga pendidikan permanen dalam rangka menyebarkan misi pembaruannya itu, yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial dalam rangka pembaruan Islam.

Pada dekade yang sama di awal abad ke-20, muncul pula organisasi-organisasi yang berorientasi politis, yaitu Budi Utomo (BU) dan SyarekatIslam (SI). Dua organisasi ini sama-sama menentang pemerintahan kolonial,hanya saja berbeda orientasi. Kalau Budi Utomo bersifat nasionalis dan menentang Belanda karena pemerintahan orang asing (penolakan terhadap orang-orang asing), maka Syarekat Islam menentang Belanda karena dianggap sebagai pemerintahan orang-orang kafir (penolakan terhadap agama yang dianut oleh para aktor pemerintahannya). Tetapi walaupun para fungsionariskedua organisasi itu sama-sama Islam, namun mereka terdiri dari kalangan modernis atau pembaru (khususnya Budi Utomo).

Pandangan kaum modernisme Islam nampaknya lebih akomodatif terhadap modernisasi yang berkembang pesat di Barat, apalagi kalangan penggeraknya, selain yang terpengaruh langsung dengan ajaran Wahabi, juga adalah kalangan intelektual beragama Islam yang ditempah dalam system pendidikan ala Barat. Sehingga kecuali menentang tradisional kalangan tradisionalonalis, juga merubah atau memperbarui metodologi pendidikan bagi orang-orang Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walupun begitu nilai-nilai moral Islam tetap dipegang teguh, sementara misi terhadap revitalisasi Islam yang bisa menjadi dinamis dan mampu bersaing dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan modern tanpa menghilangkan moral dan sandaran-sandaran agama masa lalunya.Gelombang reformisme pada awal abad ke-20 ini dicatat sebagai mewakili perkembangan intelektual Islam Islam Indonesia tahap pertama.

Perkembangan berbagai organisasi Islam yang berideologi pembaruan itu,tampaknya dianggap oleh NU secara khusus sebagai suatu ancaman akan eksistensi model pendidikan yang dilakukan melalui pondok-pondok dan pesantren-pesantren, dan atau secara umum mengancam eksistensi gerakan penganut salah satu dari empat mazhab.[4]

Meskipun terdapat kerjasama antara tokoh-tokoh Islam dalam suatu organisasi yang bernama Kongres Al Islam tetapi tampaknya wadah para ulama tokoh Islam baik dari kalangan tradisional maupun pembaru ini tak mampu mengakomodasi kepentingan semua kalangan, karena didominasi oleh kalangan pembaru.

Misalnya pada saat memenuhi undangan Raja Ibnu Sa'ud menghadiri Kongres Al Islam di Mekkah, dengan melalui Kongres Al Islam keempat di Yogyakarta pada tanggal 21-27 Agustus 1925 telah diputuskan delegasi yang hadir yaitu H. O. S Tjokroaminoto (dari Syarekat Islam) dan KH Mas Mansur (dari Muhammadiyah). Ini menimbulkan kekecewaan dari kalangan tradisional yang berdampak pada beberapa

---

[4] *Ibid.*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan yang dilakukan oleh kalangan tradisional dalam rangka mempertahankan yang mereka anut (penganut salah satu dari empat mazhab).

Salah satunya kalangan tradisional mengambil inisiatif untuk membangun kelompok yang bertugas khusus untuk berkunjung di Arab Saudi menemui Raja Sa'ud, penguasa Arab(Mekkah dan Madina, penganut aliran Wahabi) dalam rangka menyampaikan paling tidak dua masalah penting. Pertama, himbauan umat Islam Indonesia(khususnya penganut Ahlusunnah wal Jama'ah atau penganut dari salah satu empat mazhab) agar memberi kebebasan beribadah kepada masyarakat Arab penganut faham yang sama. Kedua, tidak melarang orang-orang Islam yang berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta para sahabatnya, terutama yang mengandung sejarah Islam.[5]

Perjuangan itu memang berhasil yang ditandai dengan adanya kebijakan baruRaja Sa'ud tentang kedua himbauan tersebut ditambah dengan upaya memberikan pelayanan kepada jamaah haji dari Indonesia. Kelompok ini semula merupakan Komite Hijaz, yang sesuai dengan kesepakatan awal memang akan berakhir namun bisa juga dianggap sebagai cikal bakal terbentuknya NU di Indonesia.[6]

Komite Hijaz ini dibentuk dirumah Kiai Wahab Chasbullah di Surabaya pada 31 Januari 1926, ia merupakan juru bicara kalangan tradisional yang paling vokal pada Kongres Al-Islam. Untuk lebih

---

[5] *Ibid.*, 8.
[6] *Ibid.*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperkuat kesan pihak luar, komite ini memutuskan megubah diri menjadi sebuah organisasi dan menggunakan nama Nahdlatoel 'Oelama. Pada tahun-tahun awal berdirinya, pertimbangan mengenai status Hijaz nampaknya tetap merupakan alasan tunggal kehadirannya.[7]

2. Struktur kepengurusan di ranting Sumorame
   a. Mustasyar : KH. Abu Ali
      KH. Asyari
      Bambang Apriadi S.Ip
   b. Syuriyah
      Rois : KH. Abdul Hamid
      Wakil Rois : KH. Abdul Manan
      Wakil Rois : M. Nasir
      Katib : M. Asnan
      Wakil Katib : H. Wakid
   c. Tanfidziyah
      Ketua : H. M. Isnan
      Wakil Ketua : Idris Ismail
      Sekretaris : Adi Aryanto
      Wakil Sekretaris : Misbach
      Bendahara : H. Huda
      Wakil Bendahara : H. Supardi
   d. Lembaga-lembaga
      1. Lembaga dakwah
         Ketua : Nurul Karim
         Sekretaris : Nur Hidayat
      2. Lembaga Ma'arif
         Ketua : Mustofa
         Sekretaris : Arifin
      3. Ekonomi
         Ketua : H. Mustakim
         Sekretaris : A. Tahar
      4. Lazisnu
         Ketua : Abdul Munif
         Sekretaris : A. Rofiq
      5. Lembaga Seni Budaya
         Ketua : M. Huzaen
         Sekretaris : Zainul
      6. Kemaslahatan Umat
         Ketua : H. Sampurno

[7] Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisional, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKIS,1994), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Sekretaris	: Sikan
7.	Lembaga Ta'mir Masjid	
	Ketua	: H. Syafaat
	Sekretaris	: H. Sunaryo
8.	Pertanian	
	Ketua	: H. Fathur
	Sekretaris	: Aminin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

1. Langkah-Langkah Ketua NU Dalam Menjalankan Fungsinya

Kepemimpinan yang efektif sangat dipengaruhi oleh kepribadian pemimpin. Setiap pemimpin perlu memiliki aspek-aspek kepribadian yang dapat menunjang usahanya dalam mewujudkan hubungan manusia yang efektif dengan anggota organisasinya.

Kesuksesan atau kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh banyak hal, yang salah satunya adalah kepemimpinan yang berjalan dalam organisasi tersebut. Pemimpin yang sukses adalah apabila pemimpin tersebut mampu menjadi pencipta dan pendorong bagi bawahannya dengan menciptakan suasana dan budaya kerja yang dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan kinerja anggota atau bawahannya.

Pemimpin tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh positif bagi bawahannya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diarahkan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Misbah selaku pengurus, bahwa :

> "Seorang pemimpin yang bisa menjalankan peran dan fungsi kepemimpinannya dengan baik agar dapat dijadikan panutan oleh bawahan".[1]

Hal senada juga diungkapakan Fathur selaku anggota, bahwa:

[1] Misbah, *Wawancara*, 11 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat".[2]

Dari data di atas, Ketua NU sebagai pemimpin jalannya organisasi dituntut untuk bisa manjalankan peran dan fungsinya sebagai seorang pemimpin dengan baik. Karena sikap dan tindakan seorang pemimpin dijadikan sebagai indikator atau tolok ukur seberapa besar antusias atau tingkat partisipasi bawahan dalam menjalankan kewajibannya.

Hal ini senada juga diungkapkan oleh Khudori selaku anggota, bahwa;

"Pemimpin yang baik yaitu pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan bersama".[3]

Begitu pula ungkapan sikan selaku pengurus, bahwa;

" pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bijaksana".[4]

Dalam hal ini, Ketua NU harus selalu sensitif terhadap legitimasi di mata masyarakatnya. Legitimasi berarti pengakuan rakyat terhadap kekuasaan dan kewenangan Ketua NU untuk bertindak, mengatur dan mengelola organisasi.

Adapun pola kepemimpinan ketua NU Ranting Sumorame terlihat dengan jelas dari sifat atau kualitas kegiatan-kegiatan pengurus Nahdlatul Ulama (Ketua NU), baik dalam memberikan pelayanan terhadap anggota maupun kebijakan-kebijakan yang diambil dalam mengelola organisasi.

---

[2] Fathur, *Wawancara,* 13 Desember 2011
[3] Khudori, *Wawancara*, 11 Desember 2011
[4] Sikan, *Wawancara,* 13 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai kinerja pengurus atau ketua dalam mengelola organisasi terdapat berbagai macam pendapat, seperti yang diungkapkan Khudori selaku anggota bahwa;

> "kinerja pengurus atau ketua NU di Ranting Sumorame sudah baik, karena banyak program yang sudah terlaksana".[5]

Hal senada juga diungkapkan Sikan bahwa;

> "kinerja kepengurusan NU Ranting sudah baik, karena segala persoalan yang bersangkutan dengan ke-NU-an selalu dirundingkan dulu".[6]

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa kinerja yang dilakukan ketua dan pengurus NU Ranting Sumorame bisa dikatakan baik, karena program-program organisasi sudah banyak yang terlaksana serta pemberian pelayanan kepada anggota berupa terbukanya informasi yakni, merundingkan segala persoalan yang berkaitan dengan ke-NU-an di Ranting. Hal serupa juga di ungkapkan misbah selaku pengurus, bahwa ;

> "kinerja ketua dan pengurus sudah baik daripada yang dulu, karena sudah banyak kegiatan yang sudah berjalan".[7]

Fathur memperkuat pendapat diatas dengan komentarnya yakni;

> "kinerjanya baik, karena programnya banyak yang dilaksanakan".[8]

Selain daripada itu, H. Abd. Manan selaku pengurus mengungkapkan bahwa;

> "Kalau masalah kinerja sudah bagus, karena dalam pelaksanaan program sesuai dengan apa yang direncanakan".[9]

---

[5] Khudori, *Wawancara,* 11 Desember 2011
[6] Sikan, *Wawancara,* 13 Desember 2011
[7] Misbah, *Wawancara,* 11 Desember 2011
[8] Fathur, *Wawancara,* 13 Desember 2011
[9] Abd. Manana, *Wawancara,* 15 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data tersebut menunjukkan bahwa dalam mengatur kegiatan dan yang berkenaan dengan organisasi, pengurus sudah memperhatikan aspirasi anggotanya. Berdasarkan wawancara di atas kita lihat bahwa Ketua NU dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat digolongkan kepada pemimpin yang mengayomi masyarakat, dan menjadi pemimpin yang lebih mementingkan kepentingan bersama atau anggota daripada kepentingan pribadi.

Oleh karena itu, menurut pengamatan peneliti, kinerja pengurus NU Ranting dalam hal pelayanan publik sudah lumayan baik. Hal ini disebabkan ketua sudah bisa menciptakan proses demokratisasi di segala aspek, peningkatan partisipasi anggota dalam kepengurusan, serta indikator pengontrol kinerja pengurus.

Kekuasaan ketua NU dapat mengatur masyarakatnya secara keseluruhan tetapi bukan berarti memerintah tanpa diimbangi dengan tindakan yang bisa memberikan motivasi terhadap bawahannya. Karena dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom masyarakat, ketua NU juga sebagai contoh dalam masyarakat.

Seperti yang dikemukakan Sikan, bahwa ;

> "ketua dan para pengurus selalu hadir dalam setiap kegiatan yang ada di Ranting ini."[10]

Hal senada juga di ungkapkan oleh basyir, bahwa;

> "peran serta ketua dan pengurus, mereka selalu datang dalam setiap kegiatan bahkan terkadang mereka membawa rokok atau kopi".[11]

---

[10] Sikan, *Wawancara,* 13 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data diatas dapat dilihat bahwa ketua NU bisa memerankan kepemimpinannya. Karena Selain memberi perintah, beliau juga memberi motivasi kepada bawahan dengan cara selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan.

2. Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan sinergi dari pelaksanaan seluruh prinsip kepemerintahan yang baik yang merupakan asas umum penyelenggaraan Negara, baik di pemerintah pusat, maupun daerah. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemerintahan dalam mengupayakan terwujudnya kepemerintahan yang baik ditentukan oleh seberapa besar prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (*good governance*) tersebut diimplementasikan secara maksimal.

Dalam konteks Ranting, pengurus ranting NU yang baik setidaknya harus menerapkan atau mengimplementasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsif, dan partisipatif yang merupakan asas umum *good governance* untuk mencapai suatu kepengurusan organisasi yang baik dan kualitas pelayanan yang baik serta tercapainya kesejahteraan masyarakat secara efektif dan efesien.

Dari hasil pengamatan dan wawancara di lapangan yang dilakukan oleh peneliti/penulis, implementasi dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dilakukan oleh ketua NU Ranting Sumorame adalah sebagai berikut:

---

[11] Misbah, *Wawancara,* 11 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Implementasi Transparansi

Transparansi (keterbukaan) atau terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi mengenai kebijakan, keuangan, dan pelayanan. Dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan organisasi, termasuk alokasi anggaran dana yang ada di ranting. Dari hasil pengamatan dan wawancara, yang dilakukan oleh peneliti dengan Misbah mengatakan bahwa;

> "Kalo masalah pengambilan kebijakan atau keputusan biasanya pengurus menyebarkan undangan kepada para pengurus dan anggota, Untuk membahas program-program yang akan dilaksanakan dan juga pencarian jalan keluar terhadap permasalahan yang ada. Seperti penggalangan dana, pembagian tugas panitia kegiatan, dan sebagainya".[12]

Oleh karena itu, dari data tersebut dalam pengambilan kebijakan atau keputusan, ketua Ranting NU Sumorame sudah transparan, artinya keterbukaan ketua NU dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, dengan melibatkan para pengurus dan juga anggota.

Pendapat senada juga diungkapkan Khudori salah satu warga Nahdliyin desa Sumorame mengatakan bahwa;

> "kalo masalah pengambilan kebijakan biasanya ketua selalu bermusyawarah dengan pengurus dan anggota".[13]

Hal yang sama di ungkapkan Fathur, bahwa ;

> "kalo masalah biaya operasional atau kegiatan biasanya berasal dari iuran warga".[14]

---

[12] Misbah, *Wawancara,* 11 Desember 2011
[13] Khudori, *Wawancara,* 11Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data tersebut menunjukkan bahwa, anggota NU memperoleh informasi secara transparan tentang apapun yang ada dalam organisasi.

b. Implementasi Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kapasitas suatu institusi pemerintahan untuk bertanggung-jawab atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang di tetapkan. Berdasarkan keterangan Misbah, mengatakan bahwa;

> "Kalo masalah laporan hasil kegiatan, ketua NU pernah membuatnya secara tertulis mas.[15]

Hal senada juga di ungkapkan Khudori selaku pengurus, bahwa;

> "Ketua pernah melaporkan hasil kegiatannya tetapi hanya dijadikan sebagai bukti tertulis saja tanpa menjelaskan ke majlis".[16]

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, pengurus NU Ranting (ketua NU) Sumorame dapat mengemban amanah, mandat dan kepercayaan yang diberikan oleh warga Nahdliyin Ranting Sumorame, serta adanya pertanggungjawaban ketua NU terhadap Rois suriyah atau terhadap warga nahdliyin desa Sumorame atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam mengelola organisasi.

c. Implementasi Responsif

Responsif atau daya tanggap terhadap aspirasi maupun kebutuhan masyarakat. Menurut pengamatan peneliti/penulis, ketua

---

[14] Fathur, *Wawancara*, 13 Desember 2011
[15] Misbah, *Wawancara*, 11 Desember 2011
[16] Khudori, *Wawancara*, 11 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

NU Ranting sumorame begitu responsif terhadap kebutuhan dan persoalan warga masyarakat di desa Sumorame, dalam mengambil kebijakan ketua NU tidak hanya bersandar pada prefrensi segelintir elite tetapi juga bersandar pada aspirasi warga. Berdasarkan keterangan Fathur salah satu warga desa mengungkapkan bahwa;

> "Kepengurusan organisasi NU di ranting sumorame ini sudah lumayan baik dibandingkan dengan kepengurusan yang dulu karena pengurus sekarang lebih peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan para anggotanya. Misalnya, kegiatan yang berhubungan dengan ke-NU-an(lailatul ijtima',istighotsah kubro, yasin dan tahlil), mengadakan iuran kurban, pengajian rutin".[17]

Hal senada juga diungkapkan Sikan salah satu warga bahwa;

> "kegiatan yang sudah berjalan di Ranting ini sudah lumayan banyak, misalnya; lailatul ijtima' yang dilakukan tiap dua minggu sekali, khaul akbar, pengajian rutin".[18]

Dari hasil wawancara tersebut, menurut pengamatan saya, ketua NU Ranting Sumorame bisa memahami pemasalahan dan kebutuhan anggotanya, di sini terlihat dari data di atas, karena pengurus Ranting seharusnya bukan hanya menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, tetapi ketua NU harus proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan warganya.

d. Implementasi Partisipasi

Partisipasi adalah bentuk keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga

---

[17] Fathur, *Wawancara*, 13 Desember 2011
[18] Sikan, *Wawancara*, 13 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perwakilan yang sah (legislative). Keterlibatan masyarakat diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan suatu program. Mekanisme kontrol dapat langsung dilakukan tanpa perlu menunggu suatu kesalahan atau penyelewengan terjadi.

Keterlibatan anggota dalam pembuatan kebijakan pada elemen keoorganisasian. Peneliti akan menguraikan hasil dari petikan wawancara dari salah seorang pengurus NU Ranting yaitu Misbah menyatakan bahwa:

> "kalo masalah partisipasi, anggota dan pengurus sangat antusias dalam setiap kegiatan".[19]

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa warga atau masyarakat terlibat dalam pengambilan kebijakan pada elemen pengurusan Ranting. Hal ini ditunjukkan bahwa warga Nahdliyin sangat antusias sekali dalam setiap kegiatan yang ada. Sebagaimana yang diterangkan oleh pengurus Ranting,Abd. Manan mengungkapkan bahwa;

> "Warga Nahdliyin desa Sumorame sangat partisipatif dalam kehidupan sehari-hari yang berurusan dengan kepengurusan Ranting dan pengelolaan organisasi. Sehingga kontrol masyarakat terhadap pengurus NU Ranting bisa berjalan."[20]

Data tersebut menunjukkan bahwa warga Nahdliyin desa Sumorame sangat partisipatif. Sehingga kontrol warga terhadap bisa berjalan. Besarnya partisipasi anggota dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan kepengurusan NU desa ini melahirkan kontrol atau

---

[19] Misbah, *Wawancara*, 11Desember 2011
[20] Abd. Manan, *Wawancara*, 15 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengawasan masyarakat terhadap kinerja pengurus dalam mengelola organisasi. Dari hal tersebut dapat meminimalisir penyimpangan – penyimpangan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh ketua NU Ranting ini.

B. Analisis Hasil Penelitian

Agar sistematis, data hasil penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang sudah disebutkan pada bab sebelumnya. Oleh karena itu, analisis akan dimulai dari langkah-langkah ketua NU dalam menjalakan fungsinya, implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* yang dilakukan ketua NU Ranting Sumorame - Majlis Wakil Cabang Candi – Cabang Sidoarjo periode 2011-2016.

1. Langkah – langkah yang dilakukan ketua NU dalam menjalankan fungsinya

Menjadi seorang pemimpin merupakan keutamaan tersendiri bagi yang memilikinya. Kepemimpinan sejati hanya bisa didapat dengan kepercayaan masyarakat kepadanya. yang untuk mendapatkan hal tersebut diperlukan kecerdasan tersendiri, bukan hanya kecerdasan intelektual namun juga diperlukan kecerdasan emosional. Termasuk mempertahankan kepemimpinan yang dimilikinya, diperlukan langkah-langkah cerdas yang harus dipilih.

Hasil analisis dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, pola atau konsep kepemimpinan ketua NU di Ranting Sumorame sudah bisa dikatakan sesuai dengan konsep kepemimpinan yang dikemukakan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Steven Covey. Dikarenakan Dari hasil wawancara "kinerja pengurus atau ketua NU di Ranting Sumorame sudah baik, karena banyak program yang sudah terlaksana",[21] hal yang sama juga di ungkapkan Sikan (45) "kinerja kepengurusan NU Ranting sudah baik, karena segala persoalan yang bersangkutan dengan ke-NU-an selalu dirundingkan dulu".[22]

Selain daripada itu, pendapat lain mengatakan bahwa; "peran serta ketua dan pengurus, mereka selalu datang dalam setiap kegiatan bahkan terkadang mereka membawa rokok atau kopi".[23]

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Ketua NU Ranting dalam menjalankan fungsinya sebagai seorang pemimpin di tingkat Ranting pada kenyataannya bisa menjalankan tugasnya dengan baik, terlihat dalam pelayanan menampung dan menjembatani keinginan masyarakat untuk mengadakan dan menjaga kelangsungan kegiatan secara konsisten. Kekuasaan ketua NU dapat mengatur masyarakatnya secara keseluruhan tetapi bukan berarti memerintah tanpa diimbangi dengan tindakan yang bisa memberikan motivasi terhadap bawahannya. Karena dalam menjalankan tugasnya sebagai pengayom masyarakat, ketua NU juga sebagai contoh dalam masyarakat.

Selain itu, Berdasarkan wawancara di atas bisa lihat juga bahwa Ketua NU dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat digolongkan kepada pemimpin yang mengayomi masyarakat, dan menjadi pemimpin yang aspiratif, maksudnya pemimpin yang memperhatikan

[21] Khudori, *Wawancara*, 11 Desember 2011
[22] Sikan, *Wawancara*, 13 Desember 2011
[23] Misbah, *Wawancara*, 11 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan anggota masyarakatnya bukan memperhatikan kepentingan pribadi. Bahkan pada kenyataannya kinerja pengurus NU Ranting dalam melayani sangat memperhatikan kebutuhan masyarakatnya.

Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa kinerja pengurus NU Ranting dalam hal pelayanan publik sudah maksimal. Dalam hal ini kinerja pengurus NU Ranting dalam menampung keinginan anggotanya bisa terwujud dikarenakan komunikasi dan motivasi antara pengurus dan anggota berjalan maksimal. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan di atas ditegaskan kembali bahwa kinerja pengurus NU Ranting dalam hal pelayanan publik sudah lumayan baik. Hal ini disebabkan ketua sudah bisa menciptakan proses demokratisasi di segala aspek, peningkatan partisipasi anggota dalam kepengurusan, serta indikator pengontrol kinerja pengurus.

Melihat fakta dalam kepengurusan yang dipimpin oleh ketua NU Ranting Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarja ini, sangat mungkin bisa dikatakan bahwa asas kepemimpinan yang dipakai adalah pola demokratis akomodatif yang menerapkan teori kepemimpinan yang dirumuskan oleh Stephen Covey. Dengan model kepemimpinannya tersebut, ketua Ranting NU di Desa Sumorame bisa diterima dan disegani oleh segenap pengurus dan anggotanya.

2. Implementasi Prinsip-Prinsip *good governance* yang dilakukan oleh ketua NU.

Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut di atas, maka analisis tentang implementasi prinsip-prinsip *good governance* yang dilakukan oleh Ketua Ranting NU Desa Sumorame adalah sebagai berikut: *Pertama,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

temuan data menunjukkan bahwa, Ketua Ranting NU Desa Sumorame sudah transparan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Misbah salah satu pengurus mengatakan bahwa "Kalo masalah pengambilan kebijakan atau keputusan biasanya pengurus menyebarkan undangan kepada para pengurus dan anggota. Untuk membahas program-program yang akan dilaksanakan dan juga pencarian jalan keluar terhadap permasalahan yang ada. Seperti penggalangan dana, pembagian tugas panitia kegiatan, dan sebagainya".[24]

Pendapat senada juga diungkapkan Khudori salah satu warga Nahdliyin desa Sumorame mengatakan bahwa; "kalo masalah pengambilan kebijakan biasanya ketua selalu bermusyawarah dengan pengurus dan anggota".[25]

Dari data di atas bisa dilihat transparansi seperti ini sudah berjalan dalam pengurus Ranting NU, yang bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan dan pelayanan administratif. Anggota organisasi, merasa puas dengan kinerja pengurus yang dikomandani oleh ketua tersebut.

Transparansi dalam tata kelola kepengurusan organisasi berfungsi mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pengurus dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini

---

[24] Misbah, *Wawancara,* 11 Desember 2011
[25] Khudori, *Wawancara,* 11 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik warga NU. Selain itu, transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan pengurus Ranting (ketua NU dan pengurus Ranting NU lainnya) dengan "terlihatnya" segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas di Ranting Sumorame.

Kedua, Ketua NU berusaha mengemban amanah, mandat dan kepercayaan yang diberikan oleh warga NU. Pemimpin yang amanah adalah pemegang mandat yang dipercayai, yang memberi mandat adalah rakyat. Pemimpin yang amanah juga pemimpin yang objektif dan adil, tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk kebaikan dan kemajuan bersama, serta pantang menyelewengkan wewenang.[26] Ketua NU Ranting berusaha untuk menjaga amanah, mandat, dan kepercayaan dengan membuat laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam menjalankan organisasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh K.H. khamid Rois Suriyah, mengatakan bahwa "Laporan pertanggung-jawaban ketua NU kepada Rois Suriyah atau kepada pengurus dan warga nahdliyin Ranting Sumorame, sebagai bukti administratif berhasil atau tidaknya kepengurusan sudah dibuat laporan secara tertulis, sehinga kami bisa tahu apa yang sudah dan yang akan dilakukan oleh ketua NU".[27]

---

[26] M. Alfan Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2009), 114.

[27] Khamid, *Wawancara*, 16 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal yang sama juga dilontarkan Misbah bahwa "Kalo masalah laporan hasil kegiatan, ketua NU pernah membuatnya secara tertulis mas.[28]

Akuntabilitas sebenarnya juga merupakan isu yang sangat penting bagi demokrasi kepengurusan Ranting dalam mengelola organisasi. Kapasitas suatu organisasi untuk bertanggungjawab atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik.

Dalam konteks organisasi tingkat Ranting atau desa, setiap pengurus organisasi mempunyai kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumber-daya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi. Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggungjawab, kepada siapa, dan apa yang dipertanggungjawabkan. Karenanya, akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja pengurus organisasi, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standar tersebut. Akuntabilitas pada sektor publik bersifat multistruktur, di mana setiap pengurus organisasi dimintai pertanggungjawaban oleh banyak pihak. Rincinya, kinerja suatu

[28] Misbah, *Wawancara*, 11 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengurus organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap warga, pengurus NU tingkat wakil cabang atau kecamatan.

Ketiga, Responsif atau daya tanggap pengurus Ranting juga merupakan isu yang sangat penting, karena pengurus harus mampu dan tanggap terhadap aspirasi maupun kebutuhan warga masyarakat, yang kemudian dijadikan sebagai prefrensi utama pengambilan keputusan di Ranting. Pengurus Ranting NU tahu apa permasalahan dan kebutuhan warga atau anggotanya. pengartikulasian terhadap kebutuhan warga masyarakat, sehingga permasalahan dan kebutuhan anggota bisa terpenuhi secara maksimal.

Sebagaimana yang diungkapkan Misbah salah satu warga desa bahwa "kinerja kepengurusan NU Ranting sudah baik, karena segala persoalan yang bersangkutan dengan ke-NU-an selalu dirundingkan dulu".[29] Hal senada juga diungkapkan Sikan bahwa "kinerja ketua dan pengurus sudah baik daripada yang dulu, karena sudah banyak kegiatan yang sudah berjalan".[30]

Selain daripada itu, fathur selaku anggota juga mengungkapkan bahwa "Kepengurusan organisasi NU di ranting sumorame ini sudah lumayan baik dibandingkan dengan kepengurusan yang dulu karena pengurus sekarang lebih peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan para anggotanya. Misalnya, kegiatan yang berhubungan dengan ke-NU-

[29] Sikan, *Wawancara,* 13 Desember 2011
[30] Misbah, *Wawancara,* 11 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

an(lailatul ijtima',istighotsah kubro, yasin dan tahlil), mengadakan iuran kurban, pengajian rutin".[31]

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Pengurus Ranting NU tidak mau terlambat dalam melaksanakan pembangunan dan pengelolaan karena pasti akan dibayar mahal. Karena dampak dari lemahnya kepengurusan bukan saja akan menimbulkan kecurigaan dan kekecewaan warga terhadap pengurus, tetapi juga memicu suasana ketidakpastian pengurus dalam mengelola organisasi di tingkat Ranting ini. Pandangan warga terhadap kualitas pengurus akan semakin negatif.

Keempat, besarnya partisipasi warga merupakan sisi lain dari praktik tata kelola kepengurusan Ranting NU Sumorame. Pengurus Ranting NU mulai dari ketua sampai dengan lembaga-lembaga yang ada dalam kepengurusan diharapkan bisa memainkan perannya, ternyata bisa memainkan peran penting dalam mewadahi partisipasi warga.

Secara konseptual, hubungan antara komponen tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) itu mutualistik dan saling mendukung. Efektivitas dan efisiensi sumber daya dalam mencapai tujuannya mensejahterakan bangsa menuntut tingkat akuntabilitas penyelenggaran kepengurusan organisasi yang relatif tinggi. Tanpa adanya partisipasi anggota untuk mengamankan proses penyelenggaraan organisasi, sulit diharapkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dapat berjalan dengan baik. Di lain pihak, partisipasi warga atau anggota

[31] Fathur, *Wawancara*, 13 Desember 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mungkin dapat berjalan dengan efektif tanpa adanya hak warga untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh pengurus Ranting. Sebaliknya, transparansi sendiri tidak mungkin tercipta jika pengurus Ranting NU ini tidak bertanggung jawab dan tidak ada jaminan hukum atas hak warga untuk mengakses berbagai informasi tersebut. Jadi, antara komponen saling mengkait dan sulit untuk dapat berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari komponen lainnya.

Dalam tata kelola pemerintahan, pengurus organisasi, sektor swasta (perangkat desa), dan warga Nahdliyin dalam proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengelolaan organisasi tersebut dapat memberikan manfaat yang terbesar bagi warga Nahdliyin Ranting Sumorame. Pengurus organisasi Ranting NU harus menciptakan lingkungan politik, ekonomi, dan hukum yang kondusif. Sebagaimana menrut Pierre Landell-Mills dan Ismael Seregeldin mengartikan *good governance* sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi. Sektor swasta menciptakan kesempatan kerja yang implikasinya meningkatkan peluang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sisi kelemahan dalam kepengurusan di Ranting NU Desa Sumorame ini, bisa tertutupi oleh kebijaksanaan ketua pengurus dalam mengorganisir bawahannya. Dengan karisma yang dimiliki dan simpati anggota pengurus terhadapnya, sedikit banyak juga turut menyumbangkan kelancaran dalam menjalankan segala program yang telah dibuat. Namun,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan wawancara dengan para anggota NU Desa Sumorame, yang menyebabkan berjalannya hampir semua program kegiatan Ranting, dikarenakan cara kepemimpinannya yang betul-betul bisa diterima oleh masyarakat.

3. **Dampak Dari Implementasi Prinsip-Prinsip *good governance* Yang Dilakukan Oleh ketua NU.**

Setiap kinerja maupun tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh setiap pemerintah baik pusat, daerah, maupun pemerintahan desa pasti mempunyai dampak, baik positif maupun negatif. Menurut Dwipayana dan Eko Sutoro (2003), *governance* merupakan konsep netral, yang darinya kita bisa menformat model yang baik, sehingga muncul istilah *good governance*, atau model yang tidak baik, sebuah model tata kelola kepemerintahan yang tidak baik (*bad governance*). Oleh karena itu, dampak dari implementasi adalah merupakan implikasi logis dari implementasi tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Ketua NU Ranting Sumorame. Baik buruknya organisasi sangat tergantung pada pemimpin atau ketuanya, sebagai pemegang kekuasaan dan sebagai pemimpin.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti/penulis, maka dampak dari implementasi tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh ketua NU Ranting Sumorame periode 2011 – 2016, adalah sebagai berikut :

a. Dengan adanya transparansi ketua NU Ranting Sumorame terhadap warga Nahdliyin desa Sumorame, sehingga tidak akan terjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyimpangan - penyimpangan pemimpin, yaitu akan terjauhnya praktik KKN dalam organisasi ditingkat Ranting ini. Dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal. Warga merasa dihargai akan haknya sebagai bawahan, karena adanya keterbukaan dari ketua, baik dalam pengambilan kebijakan, ataupun informasi yang lain.

b. Dengan adanya pertanggungjawaban ketua NU kepada anggota, mengakibatkan proses *checks and balances* dan fungsi kontrol terhadap pengurus bisa berjalan dengan baik karena bisa mengetahui seberapa besar berhasil atau tidaknya ketua dalam mengimplementasikan program-program dan kebijakan yang sudah ditetapkan.

c. Responsif atau daya tanggap Ketua NU Ranting Sumorame merupakan isu yang sangat penting bagi terwujudnya *good and clean governance*, daya tanggap ketua NU Ranting Sumorame dalam melihat permasalahan dan kebutuhan warga di desa Sumorame bisa dibilang cukup responsif. Ketua NU Ranting Sumorame tahu akan kebutuhan anggotanya, seperti diadakannya *lailatul ijtima'* yang selain acaranya adalah istighotsah namun juga berfungsi sebagai majlis taklim yang bisa menjadi media anggotanya untuk mendiskusikan permasalahan, baik permasalahan agama, ekonomi, politik dan lain sebagainya.

d. Besarnya partisipasi sangat penting dalam pengelolaan organisasi di tingkat desa, warga Nahdliyin Sumorame selalu berperan aktif dalam setiap program kegiatan. Kontrol anggota serta fungsi *checks and*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

balances bisa berjalan. Sehingga bisa meminimalisir penyimpangan-penyimpangan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh ketua. Yang dimaksud partisipasi warga dalam *governance* adalah keterlibatan warga dalam pembuatan keputusan mengenai penggunaan sumber daya publik dan pemecahan masalah publik untuk pembangunan organisasinya. Di samping besarnya organisasi tersebut menunjukkan bahwa ketua di organisasi tersebut diterima oleh anggotanya.

Dampak dari implementasi tersebut kebanyakan anggota NU ranting di Desa Sumorame merasa dihargai hak – haknya sebagai anggota. Oleh karena itu, kepengurusan yang diakukan oleh Ketua NU Ranting Sumorame 2011 – 2016, lebih dekat kepengurusan yang baik (*good governance*) yang lebih memperhatikan permasalahan-permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan anggotanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai "peranan kepemimpinan ketua NU dalam mewujudkan *good governance* di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo", penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan masyarakat NU di ranting Sumorame terhadap konsep *Good governance* adalah suatu konsep pengelolaan organisasi yang harus diterapkan oleh seorang pemimpin agar tercipta hubungan yang sinergis antara pengurus organisasi dengan anggota. Sehingga tercipta suasana yang harmonis dalam berorganisasi. Dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa masyarakat NU di ranting Sumorame menginginkan terciptanya demokratisasi di segala aspek, peningkatan partisipasi anggota dalam kepengurusan, serta indikator pengontrol kinerja pengurus. Dan hal ini pun ternyata bisa di wujudkan oleh sosok sentral dari organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama di ranting Sumorame. Yakni, ketua NU di ranting Sumorame periode sekarang.
2. Dalam kepengurusan organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama Ranting Sumorame diketahui bahwa implementasi dari prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, reponsif dan partisipasi yang merupakan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good clean governance*) yang bebas dari KKN bisa dijalankan dengan baik, terlihat dari berjalannya Proses *checks and balances* dan kontrol masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap kepengurusan bisa berjalan dengan baik, sehingga ketua cenderung mempersempit gerak ketua untuk melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang. Sehingga praktiknya mencerminkan kesejahteraan bagi warga Nahdliyin desa Sumorame.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan yang telah dikemukakan penulis di atas, kemudian penulis memberikan saran-saran yang disampaikan pada objek penelitian yang berada di Desa Sumorame Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

Adapun saran-saran tersebut adalah :

1. Melihat realitas atau fakta yang terjadi, dalam sebuah organisasi. Diharapkan untuk kedepannya ketua organisasi yang akan menjabat pada periode selanjutnya bisa mencontoh kepemimpinan dalam organisasi yang diterapkan oleh ketua NU Ranting periode. Karena organisasi merupakan miniatur terkecil dari sebuah pemerintahan negara yang sangat dekat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
2. Kepada pihak pengurus organisasi kemasyarakatan Nahdlatui Ulama Ranting Sumorame agar dapat mempertahankan dalam penerapan atau pengimplementasian prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih *(good and clean governance)*. Supaya tetap terwujud pemerintahan yang baik dan bersih, efektif dan efesien dan jauh dari praktik KKN.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun ini jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap skripsi ini bisa menjadi batu pijakan bagi penulis selanjutnya untuk meneliti lebih dalam tentang peranan kepemimpinan ketua NU dalam mewujudkan *good governance.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2007. *Muhammad* SAW *The Super Leader Super Manager,* Jakarta : PLM.

Azra, Azyumardi. 2000. *Pendidikan Kewargaan* (*Civic Education*), Jakarta : Prenada Media.

Azwar, Syaifuddin. 2004. *Metode Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Bruinessen, Martin Van. 1994. *NU: Tradisional, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru,* Yogyakarta : LKIS.

Faisal, Sanpiah. 1990. *Penelitian Kualitatif; Dasar dan Aplikasinya,* Malang: Y. A. J.

Hidayat, Komaruddin dan Azyumardi Azra. 2008. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education),* Jakarta : Prenada Media Group.

Ida, Laode. 1996. *Anatomi Konflik NU, Elit Islam, dan Negara,* Jakarta : PustakaSinar Harapan.

Kartono, Kartini. 1998. *Pemimpin* dan *Kepemimpinan,* Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Mardalis. 2003. *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal,* Jakarta : Bumi Aksara.

Marijan, Kacung. 1992. *Quo Vadis NU: Setelah Kembali ke Khittah 1926,* Jakarta : Erlangga.

Moeleong, Lexy J. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung : Remaja Rosdakarya.

Muhajir, Neong. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta : Reka Sarasin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 1997. *Metodologi Penelitian Cet. I,* Jakarta : Bumi Aksara.

Nasution, S. 1982. *Metode Research, Edisi I*, Bandung : Jemmars.

Permadi, K. 1996. *Pemimpin* dan *Kepemimpinan Dalam Manajemen,* Jakarta : PT RINEKA CIPTA.

Santosa, Pandji. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance.*

Sedarmayanti. *Reformasi Administrasi* Publik, *Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan,* (*Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik*).

Shodiq, Muhammad. 2004. *Dinamika Kepemimpinan NU,* Surabaya : Lajnah Ta'lif Nasyr (LTN) NU.

Siddiq, Achmad. 1969. *Pedoman Berpikir Nahdlatul Ulama',* Jember : PMII Cabang Jember.

Slamet, Yulius. 2008. *Metode Penelitian Sosial*, Surakarta : LPP UNS dan UNS Press.

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabet.

Suryabrata, Sumadi. 2003. *Metodologi Penelitian,* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Terry, George R. 1993. *Prinsip-prinsip Manajemen,* Jakarta : Bumi Aksara.

Thoha, Miftah. 1995. *Kepemimpinan dalam Manajemen,* Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Thoyfoer. 2010. *Politik* Kebangsaan *NU: Tafsir Khittah NU 1926,* Yogyakarta : Penerbit Mutiara.

Tim Penyusun Panduan Skripsi. 2002. Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin. Surabaya : Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel.

Winardi. 1990. *Kepemimpinan dalam Manajemen,* Jakarta : Rineka Cipta.

http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_ulama/Februari 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id